

# WARTA PENGAWASAN

NOMOR 2 TAHUN 2022

KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BANGGA  
BUATAN  
KITA



ISSN 0854-0519



**Majalah Warta Pengawasan** merupakan media informasi dan komunikasi di lingkungan aparat pengawasan serta sebagai sarana untuk memasyarakatkan konsep dan praktik pengawasan kepada seluruh lapisan masyarakat

---

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP  
Pusat Lantai 1 Jalan Pramuka No. 33  
Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. +6221-8591-0031, pes 0102 dan 0103. Desain cover oleh: Kominfo BPKP/Adithia Ramadhan.  
Diterbitkan Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  
Berdasarkan: Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519, Homepage: [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) - Email: [wartapengawasan@gmail.com](mailto:wartapengawasan@gmail.com). Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

**Majalah Warta Pengawasan** dapat di unduh melalui



# EDITOR'S NOTE

---

**J**ulukan ‘Kecil-Kecil Cabe Rawit’ pas ditujukan kepada UMKM Indonesia. Menyumbang 14% terhadap total ekspor nonmigas dan gas (migas), partisipasi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp 8,6 triliun. UMKM tidak hanya mampu menyerap 97 persen tenaga kerja, tetapi juga mengintegrasikan investasi sebesar 60,4 persen. Tak heran, jika Presiden Joko Widodo begitu giatnya mendorong pemerintah untuk menggenjot belanja produk dalam negeri (PDN) kementerian/lembaga/pemerintah hingga BUMN/D, sebab aktifnya industri dalam negeri terbukti vital terhadap perbaikan ekonomi Indonesia.

Mengangkat judul “Bangga Buatan Kita”, Warta Pengawasan Edisi II Tahun 2022 kali ini menyuarakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan bangsa yang mandiri melalui penggunaan produk dalam negeri. Untuk melihat bagaimana

pemerintah mengawal belanja produk-produk lokal dapat pembaca simak selengkapnya pada rubrik *Cover's Story*.

Melihat sektor bisnis UMKM di Indonesia pada 2021 yang mencapai 64,19 juta, menjadi urgensi tersendiri bagi pemerintah untuk memberikan ruang pemasaran dan promosi. Selain e-katalog, daerah juga punya Si-Open dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebuah toko daring produk lokal dengan ribuan produk dan transaksi. Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian industrinya, kami ulas dalam rubrik *Governance Vantage Point*. Pada rubrik tersebut, pembaca dapat mengetahui tantangan implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dari sisi *supply*, *demand*, dan *market*, serta bagaimana strategi yang perlu dibangun untuk mengatasinya. Berbicara mengenai perumusan strategi, jangan lewatkan rubrik *Risk Management Vantage Point* agar

dalam pengambilan keputusan strategik tidak salah dalam menilai risiko.

Di luar pemerintahan, keinginan kuat untuk mendorong industri dan potensi anak negeri ditunjukkan oleh Sabrina. Tanggap melihat potensi ekonomi digital Indonesia, Sabrina mengembangkan Natuno Lab untuk mawadahi kebutuhan desain produk untuk produk digital. Melalui kisahnya banting setir dari karyawan menjadi pengusaha dalam rubrik *Inspiring Person*, semoga kita bisa memaknai kegigihan dalam perjuangan panjang mendalami berbagai bidang. Sebagaimana pepatah banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan juga bagi kita untuk memanifestasikan kecintaan terhadap karya dan potensi negeri ini. Semoga majalah Warta Pengawasan edisi kali ini dapat semakin menguatkan komitmen kita terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri.

Selamat membaca dan Salam **#BanggaBuatanIndonesia** !

---

Salam Redaksi

## SUSUNAN REDAKSI

**Pelindung:** Kepala BPKP – **Pembina:** Sekretaris Utama – **Penasihat:** Para Deputi Kepala BPKP – **Penanggung Jawab:** Eri Satriana – **Kontributor Ahli:** Arief Tri Hardiyanto, Setya Nugraha, Iwan Agung Prasetyo – **Kontributor Tetap:** Edi Sunardi, Sindu Senjaya Aji – **Pemimpin Umum:** Riyanti Ridzki Dewi – **Wakil Pemimpin Umum:** Nurly Wulan Sari – **Pemimpin Redaksi:** Betrika Oktaresa – **Pemimpin Administrasi:** Ristiandi Wijanarko – **Redaktur Pelaksana:** Nadia Khaerunnisa – **Sekretaris Redaksi:** R. Hanifah – **Reporter:** Gilang Rahmat Hastanto, Ayu Isni Arum, Amalia Septianti, Adithia Ramadhan, Wiwin Savitri, Putri Septanti Ismalia, Ferina Indah Pamaswari – **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini – **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Viana Anggraeni Zahrin – **Administrasi:** R. Hanifah – **Dokumentasi:** Edi Purwanto – **Sirkulasi:** Petrus Sonny Santoso Putra

# CONTENTS

- 04 THE BRIEF**  
Bangga Produk Buatan Kita
- 08 COVER STORY**  
Kawal Belanja Dalam Negeri untuk Bangsa Mandiri
- 14 INFOGRAPHIC**
- 16 INDONESIA THIS QUARTER**
- 20 RISK MANAGEMENT VANTAGE POINT**  
Pentingnya *Informed Risk Taking* (di Jalur yang Benar)
- 24 GOVERNANCE VANTAGE POINT**  
Geliat Pemda Wujudkan Kemandirian Industri dan Fiskal Daerah
- 28 INTERNAL AUDITOR'S UPDATE**  
Selamatkan Bumi, Lindungi Organisasi
- 33 PREVIEW**
- 34 INSIGHT**  
Menepis Bias pada Data





37

## **PUBLIC POLICY**

Belajar dari Konsumen Jepang: Orientasi Kualitas, Tuas Industri Dalam Negeri

40

## **JFA TALK**

43

## **INSPIRING PERSON**

Sabrina dan Banyak Jalan Menuju Inkigai

48

## **BOOK REVIEW**

Sisi Lain Perjalanan Ekonomi Asia Timur

52

## **MOVIE REVIEW**

Dari Kota Apel Hingga *The Big Apple*

54

## **THE BEAUTY OF INDONESIA**

Tanjung Bongo: Surga Kecil di Pulau Halmahera

-

## **ARTIKEL**

- 02 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Esensi, Konsolidasi dan Implementasi
- 11 Mengulas P3DN dari Perspektif SPIP Terintegrasi Pemerintah Daerah
- 17 Benang Merah Kepuasan Kerja dan *Followership*





# BANGGA PRODUK BUATAN KITA



**S**ejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah adalah melalui percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK). Pada tahun 2022, alokasi belanja barang dan jasa serta modal pemerintah kurang lebih sebesar 1.000 triliun. Dari angka tersebut, sebesar 40% atau 400 triliun berpotensi digunakan untuk pembelian produk dalam negeri dan produk UMKK. Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi bahwa jika potensi tersebut direalisasikan dalam Semester I Tahun 2022, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7%.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pada tanggal 30 Maret 2022 lalu, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Foto  
Humas  
Kemasetneg



Perhatian besar Presiden terkait keberhasilan gerakan nasional ini terlihat jelas dalam arahan Presiden pada acara Pengarahan dan Evaluasi Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di Jakarta Convention Center, Provinsi DKI Jakarta, 24 Mei 2022.

**“APBN kita, APBD kita, anggaran yang ada di BUMN, betul-betul harus kita pegang erat agar pemanfaatannya bisa betul-betul ke fokus, ke titik yang kita tuju, karena uangnya gede banget, besar sekali. APBN kita Rp2.714 triliun, APBD Rp1.197 triliun, gede sekali, plus BUMN. Seperti yang saya sampaikan di Bali, karena ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat, ya jangan dong kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu. Sehingga muncul Bangga Buatan Indonesia ini, akan saya ikuti terus.”**

Lalu, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan produk dalam negeri itu? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, definisi Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa,

termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri. Implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dinilai dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Dalam aspek untuk mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor, P3DN juga menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar.

Mengingat pentingnya memastikan program P3DN ini berhasil untuk dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional, maka pengawasan perlu dilakukan terutama atas implementasi dari Inpres nomor 2 tahun 2022 tersebut. Memastikan agar komitmen bersama dari seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN untuk menganggarkan dan merealisasikan belanjanya untuk produk-produk dalam negeri dapat terwujud.

(Betrika Oktaresa)

[https://bit.ly/  
KawalBelanjaDalamNegeriuntukBangsaMandiri](https://bit.ly/KawalBelanjaDalamNegeriuntukBangsaMandiri)



# Kawal Belanja Dalam Negeri untuk Bangsa Mandiri

Betrika Oktaresa

Penggunaan produk dalam negeri terus digaungkan oleh Pemerintah Indonesia. Ketegasan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menunjukkan bahwa kesadaran dan kemauan kita untuk mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri merupakan hal yang krusial terutama dalam kondisi pemulihan ekonomi saat ini. Pada saat memberikan arahan kepada Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah dan Badan Usaha Milik Negara dalam acara Aksi Afirmasi Bangsa Buatan Indonesia, di Bali pada

Jumat (25/03), Presiden meminta agar para Menteri, Kepala Lembaga, hingga Kepala Daerah untuk mengurangi pengadaan barang impor dan mendorong penggunaan barang-barang dalam negeri dalam pengadaan barang di instansinya masing-masing. Arahan lebih tegas kemudian disampaikan oleh Presiden pada acara Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia, di Jakarta Convention Center (24/5). "Ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang



rakyat. Jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu.”

Tak hanya itu, landasan hukum juga diterbitkan oleh Presiden dalam bentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sejalan dengan Inpres tersebut, Pemerintah

telah mengidentifikasi tiga aspek dalam rangka mewujudkan target Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Tahun 2022, yaitu penciptaan permintaan produk dalam negeri, dukungan atas penguatan suplai bagi industri dan UMKK, serta pengembangan *government marketplace*. Ketiga aspek tersebut merupakan operasionalisasi dari kebijakan P3DN yang didukung dengan pembinaan dan pengawasan.

Guna memastikan agar tiga aspek tersebut dapat diwujudkan, sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, BPKP melakukan

---

Foto  
**Humas**  
Kemensekneg

---

pengawasan atas P3DN dan mengoordinasikan APIP dalam membantu pengawasan tersebut di lingkungan instansinya dalam rangka mewujudkan target P3DN di Tahun 2022. Dari sisi koordinasi, BPKP memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan intern atas P3DN dari APIP bergerak ke tujuan yang sama. Oleh karena itu, BPKP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2022 (Rakornas Wasin 2022) dengan tujuan sebagai wadah untuk menyampaikan capaian, hambatan, tantangan, dan rencana aksi serta langkah strategis yang konkret dan pragmatis atas pencapaian target P3DN, serta sinergi dan kolaborasi dengan APIP dalam rangka merencanakan pengawasan berkelanjutan atas P3DN sehingga tujuan program P3DN dapat tercapai.

Dalam laporannya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melaporkan transaksi produk lokal di e-katalog pada bulan Juni ini berhasil saingi produk impor. Berdasarkan hasil validasi BPKP terhadap Rp180,72 T (45,18%) realisasi belanja Produk Dalam Negeri, masih ada tiga masalah utama yang perlu diselesaikan untuk menyukseskan program P3DN. Pertama, ketiadaan daftar rujukan produk dalam negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga menyulitkan perencanaan belanja produk lokal. Kedua, harga produk lokal yang masih relatif tinggi dibanding produk impor. Ketiga, pengendalian dan pemantauan efektivitas belanja produk lokal oleh manajemen belum optimal.





“Setidaknya terdapat 842 produk impor yang dibeli melalui e-katalog sudah ada produk lokalnya,” jelas Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2022. Ia pun mendorong pengembangan industri lokal untuk mengantisipasi nihilnya produk lokal pengganti. Disampaikan Yusuf Ateh, untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan afirmasi PDN dalam belanja pemerintah, BPKP telah merancang desain pengawasan kolaboratif, sebagai bentuk pengawalan BPKP bersama seluruh APIP dan pengawas internal BUMN.

Kemudian, dalam arahannya pada acara tahunan tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan, “Kalau ada pabrik kecil yang biasanya melayani kapasitas 1.000,

ada pesanan dari pemda, ada pesanan dari pemerintah pusat 10.000 ya mau tidak mau dia akan ekspansi memperluas pabriknya, memperluas industrinya. Artinya, pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi. *Gak* usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang. Artinya, APBN, APBD itu bisa *men-trigger* investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan ya caranya seperti ini.”

Presiden pun mengapresiasi peningkatan jumlah e-katalog lokal pemerintah daerah. “Kemarin dari 514 kabupaten/kota, 34 provinsi, baru ada 46 daerah yang memiliki katalog lokal, sekarang ini kita sudah naik menjadi 123. Naiknya cepet ini pasti dikejar-kejar BPKP. Awasi betul, kawal betul, agar semua kabupaten/kota/provinsi segera memiliki e-katalog lokal,” kata Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo meminta pengawalan dilakukan secara konsisten, menjaga kepatuhan K/L/D/BUMN/BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri, dan memberikan sanksi yang tegas untuk ini.



Foto  
**Kominfo  
BPKP**

**“Saya minta kepada BPKP mensinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,”** pesan Presiden.

Pada sesi rapat koordinasi sebagai bagian dari rangkaian acara Rakornas Wasin tersebut, para Deputi Kepala BPKP juga menyampaikan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengawal P3DN. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang menyampaikan rekomendasinya untuk mendorong usaha lokal dengan meningkatkan kualitas PDN. Selain itu, ia mendorong peningkatan kapasitas produsen dalam negeri oleh K/L terkait, baik dari sisi investasi maupun berbagai pelatihan-pelatihan. Selanjutnya, ia menyampaikan perlunya sosialisasi aturan P3DN, seperti preferensi harga dan barang wajib, segera membuat kebijakan yang mendukung penggunaan PDN, mendorong untuk meningkatkan jumlah produk tayang PDN pada e-katalog nasional dan e-katalog sektoral, dan membangun sistem informasi terkait PDN dan penyedia PDN yang komprehensif dan mudah diakses, mendorong untuk meningkatkan jumlah produk tayang PDN pada e-katalog nasional dan e-katalog sektoral.

Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto memberikan usulan rekomendasi dari segi aspek *supply*, aspek *demand*, aspek *market*, dan aspek pengawasan. Ia menjelaskan mengenai aspek pengawasan, yaitu memastikan kepatuhan implementasi kebijakan P3DN

di masing-masing K/L. APIP melakukan pengawasan atas proses penayangan produk pada e-katalog sektoral K/L dan analisis transaksinya serta penggunaan PDN dalam e-katalog sektoral K/L maupun lokal, melakukan pemantauan dan reviu atas substitusi impor, dan evaluasi atas kewajaran harga.

Rekomendasi aksi afirmasi P3DN daerah yang disampaikan oleh oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Raden Suhartono, yaitu Kemendagri agar mendorong Pemda untuk melakukan percepatan PBJ secara keseluruhan. Pemda agar menyusun rencana aksi P3DN dan memonitor progresnya. APIP agar melakukan pengawasan atas implementasi P3DN, di antaranya efektivitas Tim P3DN dan validasi atas penginputan RUP seluruh OPD. Pemda agar memaksimalkan peran bimtek dan konsultasi LKPP untuk meningkatkan jumlah katalog lokal. Kementerian terkait diharapkan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk menghasilkan produk lokal yang mampu menggantikan produk impor.

Rekomendasi kebijakan strategis atas pengawasan peningkatan penggunaan P3DN pada BUMN dan BLU yang dijelaskan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah, yaitu berupa penyusunan kebijakan, pedoman, dan



SOP. Penyusunan *roadmap* PDN, TKDN dan pengadaan melalui UMKM, memastikan implementasi target PDN dan TKDN, pengimplementasian kebijakan, penyusunan sistem PBJ yang terintegrasi, dan peningkatan peran SPI dalam proses monitoring P3DN.

Pengawasan investigasi atas percepatan peningkatan penggunaan PDN dalam rangka BBI yang dijelaskan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari dibagi menjadi tiga bahasan. Pertama, pendahuluan terdapat pembahasan mengenai pentingnya kolaborasi BPKP

dan APIP dalam pengawasan investigasi atas P3DN dan karakteristik pengawasan investigatif. Kedua, risiko P3DN yang memerlukan pengawasan investigatif. Ketiga, metode pengawasan investigatif atas P3DN.

Rakornas Wasin Tahun 2022 dihadiri oleh 2.247 peserta, yakni Pimpinan K/L/D, serta pimpinan APIP K/L/D dan Pemeriksa Eksternal ini merupakan komitmen bersama untuk merumuskan solusi dan strategi pengawalan terciptanya ekosistem yang mendukung supremasi produk lokal pada pasar domestik secara berkelanjutan.

—  
Foto  
Puslitbangwas  
—





# KOLABORASI WUJUDKAN BANGSA MANDIRI



## Arahan Presiden

dalam Rakornas Pengawasan Intern "Kawal Belanja Dalam Negeri untuk Bangsa Mandiri"

1. BPKP awasi dan kawal betul agar semua kab/kota/provinsi segera memiliki e-katalog lokal.
2. BPKP kawal komitmen belanja produk dalam negeri sebesar Rp720T agar terealisasi.
3. BPKP kawal secara konsisten, jaga kepatuhan K/L/P dan BUMN/D agar memenuhi target belanja produk dalam negeri.
4. BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain menjalankan program peningkatan belanja dalam negeri dengan penuh kedisiplinan.

BPKP telah merancang desain pengawasan kolaboratif, sebagai bentuk pengawasan BPKP bersama seluruh APIP dan pengawas internal BUMN, yang bertujuan untuk memastikan efektivitas serta akuntabilitas kebijakan serta pelaksanaan aksi afirmasi PDN dalam belanja pemerintah.



“Merespon arahan Presiden, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan beberapa poin yang harus dilakukan APIP untuk menyukseskan **Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)**”.

### 1. MEMBANTU PERENCANAAN BELANJA PDN



Sisir kembali anggaran PBJ. Pastikan, jika K/L/D/BUMN membeli produk impor, betul-betul dikarenakan produk lokalnya tidak ada

### 2. MENDORONG OPTIMALISASI PERAN TIM P3DN

Pastikan K/L/D sudah membentuk Tim P3DN dan bantu Tim P3DN dalam menjalankan tugasnya dengan baik.



### 3. MENGAJAL PENYEMPURNAAN E-KATALOG

APIP Daerah mengawal percepatan dan keberhasilan pembentukan serta efektivitas pemanfaatan E-katalog lokal pada daerah masing-masing



### 4. MEMASTIKAN KLAIM PEMENUHAN KOMITMEN P3DN

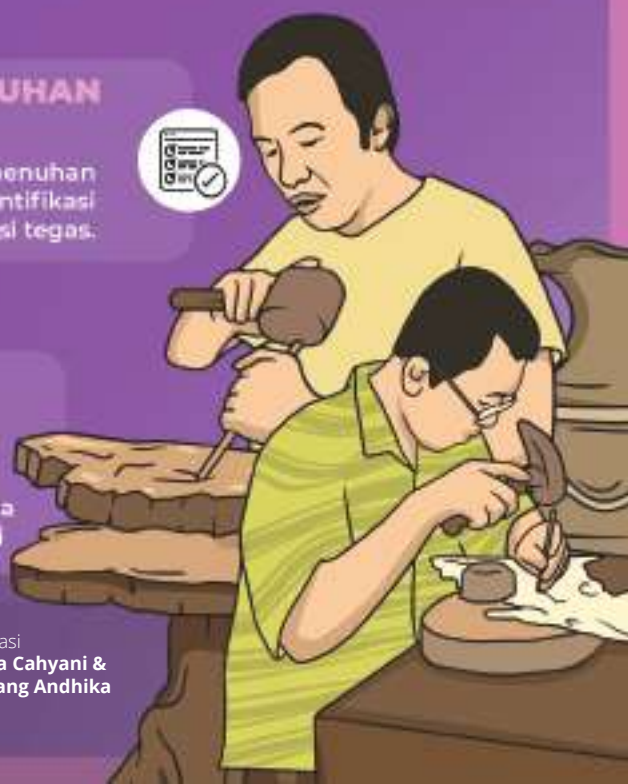
Uji dan validasi kembali klaim-klaim pemenuhan komitmen P3DN. Pelanggaran harus diidentifikasi dan diberikan sanksi tegas.



### 5. MELAKUKAN PEMANTUAN DAN MENGINTEGRASIKAN DATA PENGAWASAN



Optimalkan penggunaan Siswas P3DN agar kita mampu menciptakan pengawasan terintegrasi yang efektif.





## AUDIT SAWIT BUTUH DATA TIDAK SEDIKIT

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi hasil pengawasan BPKP terhadap penghematan negara serta akselerasi proses pemulihan ekonomi.

Selanjutnya, ia pun mempercayakan BPKP untuk melakukan pengawasan tata kelola minyak goreng, optimalisasi penerimaan negara, hingga investasi pemerintah guna memperbaiki dampak belanja pemerintah terhadap ekonomi (*fiscal multiplier*).

BPKP telah menyusun gambaran umum audit sektor sawit di Indonesia untuk mempermudah audit tata kelola proses bisnis industri kelapa sawit dari hulu ke hilir. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, audit industri sawit dilaksanakan

secara kolaboratif melibatkan instansi terkait seperti, Kejaksaan Agung, perwakilan BPKP di 29 provinsi, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, dan Ditjen Jenderal Anggaran), hingga Polri.

Dukungan data dan informasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah kepada BPKP menjadi kunci keberhasilan pengawasan ini. Selain itu, untuk membutuhkan *legal expertise*, BPKP dan Kejaksaan Agung membentuk Tim Gabungan Audit Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menyampaikan bahwa, amanat pelaksanaan audit tata kelola industri kelapa sawit oleh Presiden merupakan sebuah tugas besar dan karenanya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hasil pengawasan BPKP akan berguna dalam penyusunan kebijakan pemberian insentif yang bermuara pada kesehatan industri kelapa sawit, kesejahteraan masyarakat, menambah penerimaan negara, hingga mendorong iklim wisata.

## BERSIH-BERSIH LUMBUNG PANGAN

Langkah awal pemerintah dalam mewujudkan Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045 didukung oleh pengawasan kolaboratif oleh BPKP, APIP, dan aparat penegak hukum (APH). Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan BPKP akan membantu Kementerian Pertanian (Kementan) dalam membangun tata kelola yang baik, manajemen pengawasan dan keuangan, pencegahan kecurangan, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan kapasitas APIP dan peningkatan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko. Menyambut komitmen BPKP tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pengawasan di Kementan akan menitikberatkan pada manajemen pengawasan berbasis risiko serta pencegahan dan penanganan indikasi kecurangan/



*fraud.* Menurutnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) siap mengawal program-program Kementan agar tercapai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat.

## LIMA PRINSIP PENGAWASAN DESA



Untuk memastikan manfaat Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat, strategi pengawasan akuntabilitasnya masih perlu banyak perbaikan. Hal ini menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan adanya perubahan *design* pembinaan dan pengawasan desa.

Pengawasan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas peran pengawasan BPKP terutama

dalam meningkatkan kemandirian desa, serta mengatasi kemiskinan dan tingkat pengangguran di desa. *Grand design* ini menerapkan lima prinsip pengawasan kolaboratif, yaitu kerja sama multi-organisasi, mutual understanding, kesetaraan dan sinergi, konsensus hasil pengawasan, serta kemitraan pengawas dengan yang diawasi.

Di level pusat, Pengawasan kolaboratif desa di level pusat melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PDRT, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, BPKP, Kementerian Keuangan, dan TNP2K.

Adapun di level daerah melibatkan aparat desa, Kanwil DJPB, Dinas PMD, pendamping desa, BPD, APIP daerah, dan masyarakat.



# MENUJU NOL KARBON

Pemerintah saat ini tengah menyusun tiga strategi utama dalam Pembangunan Rendah Karbon (PRK), yaitu kebijakan *net zero emissions* untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi, serta implementasi kebijakan PRK untuk memenuhi target *net zero carbon*. Hal ini penting, sebab PRK merupakan bagian dari implementasi Ekonomi Hijau.

Sebagai auditor internal, BPKP perlu mengembangkan peta jalan pengawasannya agar mendukung keberlanjutan program PRK. Tidak hanya menyangkut akuntabilitas aspek keuangan, namun juga aspek sosial dan lingkungan. BPKP diharapkan mampu mengawal



pencapaian program nasional terkait *climate change resilience* melalui pengembangan kerangka pemantauan ESG menuju *net zero carbon*. Pengembangan kerangka ini bertujuan untuk mengembangkan *green economy* ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga pemerintah, atau pemerintah daerah di Indonesia. Khusus untuk BUMN, program ini nantinya diharapkan dapat memperluas peran auditor internal BUMN untuk dapat memantau kepatuhan dan pelaporan ESG secara independen.

Untuk menyukkseskan misi ini, BPKP juga bekerja sama dengan Monash University Indonesia Foundation terkait pengembangan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*). Mewakili BPKP pada penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Deputy Bidwas PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto dan Deputy Bidang Akuntan Negara Sally Salamah.

Hasil Pengawasan Afirmasi Belanja Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri menunjukkan capaian yang baik. Disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, peningkatan yang cukup signifikan yakni 103% atas jumlah barang yang ditayangkan pada e-katalog dibandingkan tahun lalu. Per tanggal 23 Mei 2022, terdapat kenaikan sebesar 105.000 jenis produk pada tahun 2021 menjadi 206.000 jenis produk yang ditayangkan. Transaksi pembelian produk lokal di e-katalog juga sudah lebih baik, yakni mencapai Rp16,17T dibandingkan penjualan produk impor sebesar Rp8,65T.

## ANGIN SEGAR PENGGUNAAN PRODUK LOKAL







## PENGAWASAN KOLABORATIF DI BALIK PRESIDENSI G20



Berbagai persiapan dilakukan menjelang puncak pertemuan G20 pada bulan November mendatang. Menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Perhubungan, BPKP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Intern atas Akuntabilitas Persiapan Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Deputi Kepala BPKP Bidwas PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto berharap presidensi G20 ini dapat terselenggara dengan baik dan mencapai tujuannya, termasuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam hal ini, APIP mengawal akuntabilitas pelaksanaan G20 tidak hanya sebelum dilaksanakan, melainkan juga setelah acara berlangsung.

Disampaikan Iwan, BPKP memberikan usulan mitigasi risiko penyelenggaraan G20 untuk mencegah permasalahan dan menekankan pentingnya kontribusi dari APIP K/L dalam memperkaya informasi yang dibutuhkan.





Pentingnya

## *Informed Risk Taking* (di Jalur yang Benar)

Betrika Oktaresa

**L**ebih dari satu dekade terakhir, ilmu manajemen risiko semakin populer baik dalam ruang lingkup individu maupun organisasi. Istilah-istilah risiko dan pengelolaannya, termasuk definisi manajemen risiko semakin akrab di telinga masyarakat. Pemahaman tersebut sangat terbantu dengan semakin populernya kerangka kerja Enterprise Risk Management (ERM) yang disusun oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) pada tahun 2004, yang kemudian direvisi di tahun 2017,

dan standar ISO 31000:2009 (yang kemudian direvisi di tahun 2018), yang merupakan pengembangan dari standar manajemen risiko 'Australian Standard/ New Zealand Standard 4360:2004' yang disusun oleh Australia dan Selandia Baru. Namun, dalam aplikasinya, apakah pemahaman ini cukup untuk benar-benar menerapkan manajemen risiko guna membantu individu atau organisasi mencapai tujuannya?



## Pemahaman Manajemen Risiko

Menurut penulis, untuk memahami manajemen risiko yang aplikatif, kita harus memulainya dari awal, tentang mengapa manajemen risiko itu diperlukan. Bergerak mundur ke jaman prasejarah, membuat keputusan yang baik dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko mungkin sudah dilakukan sejak awal terbangunnya peradaban manusia. Manusia yang berhasil untuk bertahan hidup pada masa itu adalah manusia yang dapat menggunakan pengalaman dan pikiran mereka untuk mengurangi ketidakpastian makanan, cuaca yang ekstrem, dan perlindungan. *Homo sapiens* bertahan hidup dengan mengembangkan ekspresi dorongan naluriyah dan konstan untuk mempertahankan organisme melawan risiko yang merupakan bagian dari ketidakpastian eksistensi. Ekspresi genetik tersebut dapat ditafsirkan sebagai awal dari manajemen risiko, sebuah disiplin ilmu dalam menghadapi ketidakpastian.

Melanjutkan pembahasan ini, mari tepikan dulu pemahaman kita tentang definisi manajemen risiko menurut COSO, ISO, atau definisi familiar lainnya. Alex Sidorenko, seorang pakar risiko asal Rusia menggambarkan dengan gamblang bahwa manajemen risiko adalah tentang mengubah budaya organisasi untuk menerima risiko dan memfasilitasi adanya diskusi tentang risiko saat melaksanakan

aktivitas, atau membuat keputusan yang strategik di dalam organisasi, termasuk keputusan terkait proyek atau investasi. Artinya, kita harus terbiasa mendekatkan manajemen risiko dengan pengambilan keputusan. Itulah kenapa, dalam revisinya, baik COSO maupun ISO sama-sama kompak memunculkan istilah “manajemen risiko harus terintegrasi dengan proses bisnis organisasi”. Dalam pemahaman ini, manajemen risiko tidak boleh dipandang sebagai proses yang terpisah dan berdiri sendiri (*standalone*). Tujuannya, meningkatkan kualitas keputusan manajemen berdasarkan *insight* dari manajemen risiko, atau bisa disebut *informed risk taking*. Nah, pernyataan ini sendiri memiliki implikasi besar bagi manajemen risiko modern.

Keputusan dalam proses bisnis organisasi bisa saja dibuat setiap hari, bukan bulanan atau triwulanan. Oleh karena itu, mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi menjadi masuk akal dan menegaskan bahwa manajemen risiko bukan dilakukan secara terpisah, dalam dokumen daftar risiko terpisah yang dibuat mungkin tiga bulan sekali atau lebih.

Secara sederhana, untuk mencapai tujuan, organisasi perlu membuat keputusan, dan atas berbagai opsi keputusan yang bisa diambil, maka organisasi perlu mendapatkan asupan informasi terkait risiko masing-masing opsi keputusan.

## Jangan Salah Menilai Risiko

Nah, lalu bagaimana melakukan penilaian risikonya? Alex Sidorenko berpendapat bahwa penilaian risiko mungkin merupakan kegiatan yang paling umum dalam proses manajemen risiko, tetapi ada garis tipis antara membuang waktu dan memberi manfaat yang besar.

Hal fundamental pertama, kita harus tahu kapan kita perlu melakukan penilaian risiko. Secara sederhana terdapat empat alasan

paling umum untuk melakukan penilaian risiko. Pertama, seseorang perlu membuat keputusan yang menyangkut hal material dan terdapat unsur pilihan dan ketidakpastian. Kedua, untuk mengoptimalkan proses bisnis organisasi. Ketiga, perlu masukan ke dalam aktivitas penganggaran, ini penting karena sumber daya organisasi tentu terbatas sehingga perlu ada prioritas. Terakhir, perlu mengatur pemantauan batas untuk risiko yang sangat fluktuatif. Merujuk pada hal ini, tentu melakukan penilaian risiko setiap triwulan, semester, atau tahunan menjadi tidak relevan karena seharusnya penilaian risiko dilakukan berdasarkan kebutuhan, seperti empat alasan di atas.

Hal fundamental kedua, kita cenderung terlalu asyik menggunakan pendekatan kualitatif karena memang lebih simpel dan mudah. Namun, apakah pendekatan ini mampu memenuhi tujuan *informed risk taking* yang benar? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, manajemen risiko diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan, jadi pendekatan apapun akan tepat jika memang mampu memberikan informasi yang akurat. Pertanyaannya, seberapa akurat pendekatan kualitatif dalam menganalisis risiko?

Faktor pertama yang menjadi momok menakutkan pendekatan kualitatif adalah *cognitive bias*, misalnya pengambil keputusan cenderung melewati risiko yang signifikan karena hanya melihat risiko yang sudah dikenal, terlalu percaya diri – menolak untuk mempertimbangkan skenario negatif, menolak untuk menerima informasi baru, *confirmation bias* – menyaring informasi menurut keyakinannya sendiri, atau *normal bias* – menolak untuk melihat keberadaan alternatif lain.

Faktor kedua, *cognitive bias* yang dikombinasi dengan literasi statistik yang rendah akan

membuat perkiraan kita tentang batasan dampak dan probabilitas jadi tidak akurat. Artinya, bisa jadi peringkat atau penilaian kualitatif risiko tidak lebih baik daripada sekedar aktivitas menebak-nebak saja. Bahkan Douglas Hubbard dalam bukunya berjudul *'The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix It'* menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif saja hanya seperti *horoscopes*, menghibur dan menarik tapi tidak memberikan manfaat apa-apa bagi kita.

### **Kembali ke Jalan yang Benar**

Berdasarkan kondisi tersebut, maka kita harus mulai memanfaatkan data-data yang ada untuk menerapkan pendekatan kuantitatif. Gunakan metode matematis untuk menganalisis risiko sehingga dapat meminimalkan kebutuhan masukan subjektif manusia. Salah satu cara adalah dengan menggunakan analisis skenario atau simulasi saat melakukan analisis risiko, alih-alih menggunakan penilaian kualitatif tradisional. Analisis risiko kuantitatif memberikan pendapat independen dan objektif tentang tujuan strategis, menilai kemungkinan pencapaiannya dan dampak risiko terhadap pencapaiannya. Tantangan kita adalah penting mengumpulkan data terutama dalam bentuk angka-angka karena pada hakikatnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan organisasi pasti lekat dengan keberadaan angka-angka. Jangan terlena dengan





'kemudahan' melakukan analisis risiko secara kualitatif, merasa puas dengan peta risiko, tetapi kita kebingungan memanfaatkan peta tersebut untuk proses bisnis yang dilakukan.

Salah satu cara utamanya adalah dengan memanfaatkan keberadaan *key performance indicators* (KPI) yang ada dan buat limitasi-limitasinya, atau disebut *key risk indicators* (KRI). Kaitannya, KRI bukan difokuskan pada pengukuran pencapaian target, tapi memberikan batasan untuk menginformasikan atau memprediksi jika ada potensi KPI yang gagal dicapai. Berdasarkan pemahaman tersebut, KPI menggambarkan "*lagging in nature*" yang merupakan indikator yang menunjukkan hasil akhir. Sedangkan KRI merupakan "*leading in nature*", di mana

indikatornya menggambarkan indikator proses yang akan berpengaruh pada hasil akhir.

Oleh karena itu, KRI seharusnya spesifik, prediktif, dan mudah dikuantitatifkan dalam bentuk angka, persentase, ataupun rasio. Hal ini penting karena nantinya, dalam setiap KRI harus ada *thresholds*-nya (ambang batas) dan *trigger points* (titik pemicu). Selain itu, karena fungsinya adalah mendukung penilaian risiko, hendaknya dilakukan reviu secara berkala terhadap KRI. Fungsinya untuk mengkalibrasi apakah sinyal-sinyal yang diberikan oleh indikator signifikan berpengaruh ke pengukuran atas tingkat keterjadian dan dampak risikonya. Dalam implementasinya, jika telah dirancang dan digunakan secara efektif, KRI akan memberikan nilai prediktif dan dapat dijadikan sebagai sinyal peringatan dini atas kemungkinan perubahan profil risiko.

Jadi, sudah tahu kan harus mulai dari mana agar pembaca bisa kembali mengelola risiko di jalan yang benar?



# Geliat Pemda Wujudkan Kemandirian Industri dan Fiskal Daerah

Rudy M. Harahap, PhD, CGCAE

**M**enteri Keuangan Sri Mulyani sering menyampaikan pentingnya peran APBN dan APBD yang semakin strategis. Ia menjelaskan pentingnya peran APBN dan APBD sebagai peredam kejut (*shock absorber*) ketika Indonesia dihantam Pandemi Covid-19, dan kini ketika menghadapi krisis

pangan dan energi global akibat perang Rusia-Ukraina dan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat.

Menurutnya, APBN dan APBD berperan sebagai peredam kejut krisis global dengan menjaga inflasi, daya beli masyarakat, tingkat kemiskinan, dan pemulihan ekonomi.

Untuk itu, menurutnya lagi, penting sekali menjaga kesehatan APBN dan APBD. Itu sebabnya, pemborosan, inefisiensi, dan

inefektivitas harus menjadi perhatian serius semua pihak.

### **Pentingnya P3DN**

Peran APBN dan APBD sebagai peredam kejut, salah satunya adalah dengan belanja pemerintah. Terkait dengan belanja tersebut, program yang tengah digalakkan oleh pemerintah tahun ini adalah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Berdasarkan Inpres 2 Tahun 2022, P3DN diharapkan akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui belanja produk dalam negeri (PDN) minimal Rp400 triliun dan penayangan 1 juta e-katalog lokal.

Ikhtiar tersebut tentu perlu didukung dari segala sisi. Dari sisi *supply*, P3DN harus didukung dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dan koperasi. Hal ini harus ditopang dengan berbagai insentif dan kemudahan.

Di sisi *demand*, ikhtiar tersebut perlu didukung dengan peningkatan belanja APBN maupun APBD atas PDN, terutama yang dihasilkan oleh UKM dan koperasi.

Di sisi *market*, kita perlu menyiapkan ekosistem digital atau *e-marketplace* yang menopang transaksi ekonomi melalui transformasi bisnis (*business transformation*) menuju ekonomi digital (*digital economy*).

Pada salah satu pidatonya, bahkan Sri Mulyani menegaskan, transformasi digital sangat penting untuk mewujudkan dan meningkatkan layanan publik, efisiensi dan efektivitas proses bisnis, dan mendorong budaya organisasi yang kolaboratif.

### **Pengalaman di Daerah**

Di daerah sendiri, P3DN sudah mulai menampakkan bentuknya. Sebagai contoh,

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membentuk Tim P3DN. Dari segi e-katalog lokal sendiri, mereka telah memiliki tiga penyedia lokal yang terdaftar dan memiliki dua produk yang sudah tayang.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri, telah terdapat aplikasi Si-Open yang merupakan toko daring atau *e-marketplace* lokal dengan 9.385 produk tayang, 6.235 transaksi senilai Rp15 miliar, serta pajak pusat dan daerah yang terpungut Rp910 juta. Hal tersebut tentu perlu terus digenjot lagi mengingat target nasional ialah 1 juta produk tayang di e-katalog lokal dan terealisasinya belanja PDN senilai Rp400 triliun dalam tahun 2022 ini.

### **Tantangan Besar**

Selain keberhasilan tersebut, masih terdapat tantangan atau risiko besar dalam menjalankan P3DN di daerah, yaitu kartu kredit pemerintah daerah yang belum berjalan dan juga terbatasnya produk lokal yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Tantangan lain dari sisi *demand* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah tidak seluruhnya secara jelas mencantumkan preferensi harga dan persyaratan PDN, alokasi belanja 40 persen ke UKM dan koperasi hanya ditetapkan secara formal dan belum diresapi, dan tidak terdapat kebijakan pemberian *reward* atas penggunaan PDN.



Dari sisi *supply*, tantangannya adalah PDN yang dihasilkan tidak kompetitif jika dibandingkan dengan produk impor, seperti dari segi kualitas, ketersediaan kuantitas, dan harga.

Dari sisi *market*, tantangannya adalah kompleksnya prosedur pendaftaran produk lokal, tidak terintegrasinya katalog lokal dan nasional, dan terbatasnya sosialisasi dan fasilitasi layanan lokal.

Sementara itu, kalau kita lihat dari sisi alat kesehatan, tantangannya adalah komponen bahan impor yang mahal, industri alat kesehatan yang memenuhi TKDN rendah, dan kurangnya pemanfaatan bahan baku dalam negeri untuk produksi alat kesehatan lokal.

Selain itu, regulasi terkait pengadaan alat kesehatan lokal masih banyak yang ambigu, insentif industri hulu dan hilir yang tidak jelas, kemampuan industri farmasi nasional terbatas, serta riset yang lemah.

### **Pengembangan Strategi**

Berdasarkan tantangan tersebut, terdapat beberapa strategi yang perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah harus memastikan berjalannya peran Tim P3DN dan pengelola e-katalog lokal, meningkatkan produk yang tayang di e-katalog lokal, mengevaluasi implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022, dan menerapkan *reward system* untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).



Selain itu, pemerintah daerah harus mendorong pengembangan industri dan produk lokal, mengendalikan pencapaian target kinerja P3DN melalui sistem informasi yang tersedia, serta membangun *clearing house* P3DN bersama dengan instansi pengawasan dan penegak hukum di daerah untuk memitigasi isu-isu yang berkembang terkait P3DN.

Dari sisi alat kesehatan, strategi yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat adalah membangun rasa kepedulian dan keberpihakan pada alat kesehatan dalam negeri di sisi petugas kesehatan kita, meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, dan mengembangkan skema insentif bagi investor produk alat kesehatan dalam negeri. Kemudian, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus merancang strategi pemberian insentif atau subsidi untuk sertifikasi TKDN, meningkatkan produksi alat kesehatan berteknologi tinggi berbasis riset, dan memberikan prioritas penayangan e-katalog lokal untuk produk alat kesehatan dalam negeri.





Foto  
BPKP  
Kalteng

### Integrasi dan Kolaborasi

Selain pengembangan strategi tersebut, pemerintah daerah harus mengintegrasikan, mengkolaborasikan, dan membangun kebersamaan para pihak di lingkungan pemerintah daerah guna mencapai tujuan P3DN.

Dalam konteks P3DN, mengacu ke *three lines of model* (3 LOM), pemerintah daerah harus memastikan *leadership* pada *governing body* daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah, unsur Forkopimda, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah.

Di sisi manajemen lini pertama, masing-masing OPD harus berperan dalam penguatan sisi *demand* P3DN, yaitu merencanakan dan merealisasikan belanja P3DN dengan tertib.

Di sisi manajemen lini kedua, pemerintah daerah harus membentuk kelompok ahli, pendukung, dan atau satuan tugas yang mendukung manajemen lini pertama dalam manajemen risiko dan pengendalian. Dalam konteks P3DN, lini kedua tersebut bisa

berupa Tim P3DN, pengelola e-katalog lokal, pendukung teknologi informasi, tim pencegahan *fraud*, dan tim pengendalian kinerja.

Di samping itu, inspektorat sebagai internal auditor pemerintah daerah harus berperan sebagai lini ketiga, yakni melakukan pengawasan P3DN secara objektif dan independen.

Nantinya, semua unsur pemerintah daerah yang terintegrasi itu akan diobservasi oleh *external assurance providers* terkait keberhasilan atau kegagalannya dalam menjalankan P3DN, seperti dari BPKP, BPK, dan atau kementerian/lembaga terkait. Intinya, seluruh pihak di pemerintah daerah harus saling bersinergi dan terintegrasi dalam menjalankan program P3DN. Hal ini akan membangun kolaborasi dalam pencapaian P3DN di daerah dan mereka tidak bekerja sendiri-sendiri.

### Penutup

Jika pemerintah daerah serius dalam menjalankan program P3DN, maka secara tidak langsung pemerintah daerah telah berperan penting dalam menciptakan kemandirian industri dalam negeri. Kemandirian industri tersebut akan memungkinkan kita bertahan dari krisis global saat ini dan ke depan. Selain itu, tentunya, kemandirian industri dalam negeri akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah seperti terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini akan meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam jangka panjang. \*\*\*



# Selamatkan Bumi, Lindungi Organisasi

**Gilang Rahmat Hastanto,**  
Auditor pada Biro Hukum dan Komunikasi

*Society is demanding that companies, both public and private, serve a social purpose. To prosper over time, every company must not only deliver financial performance, but also show how it makes a positive contribution to society. Companies must benefit all of their stakeholders, including shareholders, employees, customers, and the communities in which they operate.*

- **Larry Fink**, BlackRock Chairman and CEO in "A Sense of Purpose" (2018)

**P**ada 17 Agustus 1949, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar pertemuan bertajuk "*The United Nations Scientific Conference on The Conservation and Utilization of Resources*" di Lake Success, New York. Konferensi yang berlangsung selama tiga minggu ini tercatat sebagai upaya pertama PBB mengajak negara-negara di dunia memberi perhatian terhadap penggunaan, penyusutan dan eksploitasi sumber daya alam. Akan tetapi, upaya menjaga planet ini tentu merupakan upaya yang berkelanjutan. Seiring berkembangnya pemikiran-pemikiran, upaya yang dilakukan pun semakin terarah. Teranyar, pada 2015 PBB menciptakan "*Sustainable Development Goals*" (SDG). Secara umum, SDG dapat didefinisikan sebagai 17 tujuan yang ingin dicapai secara global, di antaranya mencakup menjaga lingkungan, mengentaskan



kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memiliki tenggat waktu pada tahun 2030.

Perhatian mengenai isu keberlanjutan (*sustainability*) bukan dimulai baru-baru ini saja. Brundlant Commission, sebagaimana dikutip oleh esgreport.com, pada tahun 1987 menciptakan konsep *three pillars of sustainability* yang terdiri dari pengembangan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ketiga komponen *sustainability* ini juga biasa dikenal dengan 3P (*planet, people, dan profit*). Dalam perusahaan dan pemerintahan, tentu saja upaya mencapai ketiga hal tersebut dimulai dengan tata kelola (*governance*) yang baik. Oleh karena itu, konsep juga dikenal sebagai *Environmental, Social and Governance* (ESG), yang tentu saja sejalan dengan SDG.

### Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola

Institute of Internal Auditor (2021) menjelaskan bahwa istilah *environmental* (lingkungan), *social* (sosial), dan *governance* (tata kelola) mengacu pada kriteria yang mencirikan organisasi memiliki karakteristik berkelanjutan, bertanggung jawab, dan beretika. IIA (2021) menjabarkan bahwa secara umum topik yang berkaitan dengan ESG dapat dikategorikan ke dalam:

1. *Environmental* (Lingkungan)  
Isu lingkungan menjelaskan bagaimana organisasi-organisasi berupaya menjaga alam. Isu-isu yang tercakup dalam topik ini antara lain emisi karbon,

pengolahan limbah, pemilihan sumber bahan baku, dan kerentanan perubahan iklim.

2. *Social* (Sosial)  
Isu sosial membahas bagaimana organisasi mengelola hubungan dengan pegawainya, konsumen, dan khalayak ramai. Risiko-risiko yang termasuk dalam kategori ini, misalnya tanggung jawab sosial korporasi, manajemen tenaga kerja, kerahasiaan data, keamanan umum, serta kesehatan dan keselamatan. Termasuk juga isu-isu yang mulai mengemuka akhir-akhir ini seperti ketidakadilan rasial, serta keberagaman, kesetaraan dan inklusivitas.
3. *Governance* (Tata Kelola)  
Tata kelola mengacu pada variabel-variabel, seperti etika bisnis, kepemimpinan, gaji eksekutif, audit, pengendalian internal, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan *shareholder right*. Risiko keberagaman secara sifat memang tergolong ke dalam risiko sosial, tetapi juga dapat digolongkan ke dalam risiko tata kelola, misalnya bagaimana tindakan untuk meningkatkan keberagaman latar belakang dewan.

Külekçi (2022) menyatakan bahwa isu-isu keberlanjutan telah menjadi komponen esensial dari setiap bisnis. Isu ini tidak hanya dilihat sebagai masalah ketaatan, tetapi juga dilihat sebagai kesempatan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu ada pertanggungjawaban untuk melihat sejauh mana organisasi memandang penting hal ini. Hal ini semakin meningkat urgensinya seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran para pemangku kepentingan akan pentingnya upaya pertanggungjawaban terhadap isu-isu ESG. Pertanggungjawaban organisasi terhadap isu keberlanjutan biasanya berbentuk laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*).

Sejauh ini, berbagai pihak telah merilis standar untuk pelaporan ESG, beberapa di antaranya



Foto  
Kominfo  
BPKP

Sustainability Accounting Standard Boards (SASB), International Integrated Reporting Council (IIRC), dan World Economic Forum (WEF). International Financial Reporting Standard (IFRS) Foundation juga telah mengajukan proposal untuk IFRS *Sustainability Disclosure Standards*. Standar ini didasarkan pada standar dan kerangka kerja yang telah ada sebelumnya dan bertujuan menciptakan acuan global untuk pelaporan *sustainability* yang berfokus pada investor.

### Peranan Audit Internal dalam ESG

Adanya kebutuhan pelaporan *sustainability* membuat peran audit internal menjadi penting. IIA (2021) dalam "*White Paper: Internal Audits Role in ESG Reporting*" menjelaskan bahwa peran penting auditor internal dalam memberikan penjaminan (*assurance*) dan nasihat (*advice*) tersebut, yaitu:

1. *Assurance*, seperti:
  - a. Reviu mengenai relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan konsistensi dalam metrik pelaporan;
  - b. Reviu pelaporan terkait konsistensi dengan pengajuan

- pengungkapan keuangan formal;
- c. Menilai materialitas atau risiko pada pelaporan ESG; dan
- d. Memasukkan ESG ke dalam perencanaan audit.

2. *Advisory*, seperti:

- a. Membangun lingkungan pengendalian ESG;
- b. Merekomendasikan metrik pelaporan; dan
- c. Memberikan advis dalam tata kelola ESG.

Pada tahun 2020, IIA memperbaharui konsep *Three Lines of Defense* menjadi *Three Lines Model*. Tujuannya, pembaharuan ini akan membawa organisasi menuju tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang lebih efektif. Tentu saja, mengemukanya isu-isu ESG juga menjadi perhatian bagi ketiga lini dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dan IIA berkolaborasi merilis panduan berjudul "*Embedding ESG and Sustainability Considerations into the Three Lines Model*" (2022).

Panduan tersebut menyoroti faktor internal dan eksternal yang mendorong pengintegrasian ESG dan *sustainability* ke dalam proses pengambilan keputusan. Hasilnya, ada beberapa faktor yang berkontribusi pada sejauh mana perusahaan mengintegrasikan ESG dan pertimbangan-pertimbangan mengenai isu keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan. Secara umum, faktor-faktor tersebut, yaitu:



1. Budaya korporasi dan perubahan perilaku;
2. Maturitas suatu organisasi;
3. Peraturan yang terus berkembang dan kondisi di lapangan mengenai pengungkapan pelaporan secara sukarela;
4. Komitmen mengenai *net zero* dan *nature-positive*;
5. Tekanan dari investor dan pemangku kepentingan lainnya;
6. Kepercayaan dan reputasi.

Untuk lebih memahami bagaimana pertimbangan-pertimbangan mengenai ESG dan *sustainability* diintegrasikan dalam praktik-praktik bisnis dan peran yang ditentukan oleh model tiga lini, WBCSD dan IIA melakukan serangkaian wawancara dengan perusahaan-perusahaan dan ahli-ahli terkemuka. Ketiga lini harus bekerjasama untuk memastikan tata kelola yang baik dan membuat model bisnis yang mampu bertahan di masa depan. Secara umum, WBCSD dan IIA menjabarkan peran masing-masing pihak sebagai berikut:

1. Organ pengurus (*governing body*) mengawasi dan menciptakan mekanisme tata kelola yang mengintegrasikan tujuan-tujuan strategis organisasi dengan mempertimbangkan isu-isu keberlanjutan dan ESG.
2. Manajemen mengembangkan pendekatan akuntansi *multi-capital* terhadap semua modal finansial dan non-finansial yang dibutuhkan model bisnis perusahaan untuk memastikan operasi berfungsi efektif.
3. Audit internal, yang independen dari organ pengurus dan manajemen, menjamin keandalan proses pengendalian intern dari pengungkapan data dan pelaporan ESG.

Dalam pengintegrasian pertimbangan-pertimbangan mengenai ESG dan *sustainability* ke dalam model tiga lini, fungsi audit internal memiliki peranan penting untuk:

1. mengumpulkan data mengenai ESG dan menciptakan pengendalian internal;
2. mengantisipasi peraturan pengungkapan ESG; dan
3. berinteraksi secara teratur dengan lini lainnya.

Dengan peran ini, unit audit internal memiliki posisi yang ideal untuk membantu organisasi mengevaluasi kesempatan, menilai perubahan pada proses operasi dan pelaporan, dan menjadi katalis untuk inovasi dan perbaikan untuk keberlanjutan.

Peran Kunci Tiga Lini dalam Pertimbangan Sustainability dan ESG



Source: "Embedding ESG and Sustainability Considerations into the Three Lines Model" (2022)

## BPKP dan Isu-Isu Keberlanjutan

BPKP sebagai auditor internal pemerintah Indonesia juga telah menaruh perhatian terhadap isu-isu ESG. Dalam *1<sup>st</sup> APEC Economic Committee Meeting* pada Februari 2022, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Sally Salamah mengajak ekonom lain, para peserta pertemuan tersebut, untuk memetakan kembali praktik-praktik tata kelola korporasi dan menyelenggarakan dialog kebijakan berdasarkan pemetaan tersebut. Sally mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 dan perubahan iklim telah menunjukkan bahwa ada celah dalam penerapan tata kelola korporasi berupa strategi-strategi perusahaan yang belum menginternalisasikan biaya/harga dari dampak sosial dan lingkungan. Sally menjelaskan bahwa salah satu cara memperbaiki hal ini adalah dengan mendengarkan kepedulian para pemangku kepentingan terhadap pengembangan sosial dan lingkungan dengan

mengintegrasikan menerapkan kebijakan yang sejalan dengan strategi ESG.

Selain itu, pada Mei 2022, BPKP dan Monash University Indonesia Foundation menandatangani nota kesepahaman yang mengatur kerja sama penguatan kapasitas pengawasan intern BPKP atas program pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kedua pihak berharap sinergi antara kepakaran Monash di bidang teori keberlanjutan dan pemahaman BPKP mengenai praktik pengawasan internal akan menghasilkan sinergi yang berperan dalam efektivitas kampanye penanggulangan dampak perubahan iklim.

Paling baru, pada Juli 2022, BPKP juga turut berpartisipasi dalam *International Conference on Sustainability in Asia*. Koordinator Pengawasan Badan Usaha Kawasan Industri dan Perumahan BPKP Robertus Mauro Nugroho Putro hadir mewakili Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP. Ia menjelaskan bahwa BPKP akan mengawal pencapaian program nasional terkait *climate change resilience* melalui pengembangan kerangka pemantauan ESG menuju *net zero carbon*. Selain itu, BPKP juga menargetkan perluasan peran auditor internal BUMN untuk dapat memantau kepatuhan dan pelaporan laporan keberlanjutan secara independen.

## Referensi

- Bergman, Mark S., Ariel J. Deckelbaum, and Brad S. Karp. *Introduction to ESG*. 2020. <https://corpgov.law.harvard.edu/2020/08/01/introduction-to-esg/>. Diakses pada 24 Juli 2022.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2022. *BPKP melalui Deputi Akuntan Negara menjadi Delegasi dalam Acara APEC 2022 1st Senior Officer Meeting*. <https://www.bpkp.go.id/dan/berita/read/34257/5/BPKP-melalui-Deputi-Akuntan-Negara-menjadi-Delegasi-dalam-Acara-APEC-2022-1st-Senior-Officer-Meeting.bpkp>. Diakses pada 24 Juli 2022.
- \_\_\_\_\_. 2022. *Auditor Internal Juga Harus Ahli Mengawal Pembangunan Berkelanjutan*. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/35706/0/Auditor-Internal-Juga-Harus-Ahli-Mengawal-Pembangunan-Keberlanjutan>. Diakses pada 24 Juli 2022.
- \_\_\_\_\_. 2022. *Deputi Bidang Akuntan Negara Turut Berpartisipasi pada International Conference on Sustainability*. <https://www.bpkp.go.id/dan/berita/read/36824/0/DEPUTI-BIDANG-AKUNTAN-NEGARA-TURUT-BERPARTISIPASI-PADA-INTERNATIONAL-CONFERENCE-ON-SUSTAINABILITY.bpkp>. Diakses pada 24 Juli 2022.
- ESG Report. 2022. *What is SDG and ESG?*. <https://www.esgthereport.com/what-is-sdg-and-esg/#So-what-exactly-are-SDG-and-ESG>. Diakses pada 24 Juli 2022.
- Fink, Larry. *A Sense of Purpose*. 2018. <https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/2018-larry-fink-ceo-letter>. Diakses pada 24 Juli 2022.
- The Institute of Internal Auditors. 2021. *White Paper: Internal Audits Role in ESG Reporting*.
- \_\_\_\_\_. 2022. *Embedding ESG and Sustainability Considerations into the Three Lines Model*.
- KPMG. 2022. *Get Ready for ISSB Sustainability Disclosure*.
- Kulekci, Fatma Feyza, and Michel Kee. *The Role Of Internal Audit In The Sustainability Journey*. 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=xEvRWH3JR2Q>. Diakses pada 24 Juli 2022.

# Preview

**M**enilik visi pemerintah dalam mencanangkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), kita tentu tidak akan meragukan urgensinya. Namun realita implementasi P3DN yang membutuhkan waktu dan proses yang tidak instan, mendorong pemerintah untuk semakin serius dalam pengawasannya. Pada tahun 2009, pemerintah menginisiasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah dengan membentuk Tim Nasional P3DN. Pembaca dapat mengulas kembali bagaimana perjalanan kampanye dan agenda pemerintah ini pada artikel sisipan berjudul **"Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Esensi, Konsolidasi, dan Implementasi"** yang ditulis oleh Dwi Kiswanto, Subkoordinator Penelitian dan Pengembangan SPIP. Dalam artikel tersebut, P3DN dibahas mulai dari *multiplier effect* penggunaan produk dalam negeri, aransemen institusional yang dibangun pemerintah, hingga desain pengawasan atas titik-titik kritis pada program ini.

Bagaimanapun, kesuksesan P3DN membutuhkan komitmen

seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah. Untuk mendukung upaya tersebut, BPKP sebagai Pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melakukan transformasi kerangka pembinaannya. Lalu, bagaimana SPIP Terintegrasi dapat mendukung P3DN? Auditor BPKP Carlo Rivelacio mencoba menguraikannya pada artikel yang berjudul **"Mengulas P3DN dari Perspektif SPIP Terintegrasi Pemerintah Daerah."**

Beralih ke tataran teknis, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi ataupun negara diperlukan keselarasan antara kepemimpinan (*leadership*) dan *followership*. Mengingat sebagian besar unsur perorangan dalam organisasi adalah anggota, maka seorang pemimpin perlu mengenali tipe-tipe pengikutnya. Membahas **konsep *followership***, Auditor BPKP Arief Irwanto Lasantu akan mengajak gagasan dari Robert Kelley satu ini. Terdapat lima jenis *followership*, yakni *Domba*, *Yes-man*, *Pragmatis*, *Pengasing*, dan *Star follower*, kira-kira tipe pengikut seperti apa, Anda?

Sampai berjumpa di artikel sisipan!

# MENEPIS BIAS PADA DATA

Hafidz Arif Purwanto, S.E., M.Com (Extn),  
Pegawai Re-entry pada Pusinfowas

Mendengar istilahnya, kita mungkin akan langsung terpikir sebuah konotasi negatif. Ketika sebuah bias muncul, maka biasanya ada sesuatu yang tidak berimbang atau tidak objektif. Dalam hal penggunaan data, bias dapat hadir salah satunya dalam wujud *quantification bias*.

## Latar Belakang

Hadirnya kecanggihan teknologi informasi telah membawa gelombang tsunami data dalam jumlah yang besar. Setiap detik, manusia secara sadar maupun tidak sadar terus memproduksi data. Termasuk dalam pengambilan keputusan, data dituntut selalu hadir sebagai tolak ukur sehingga kitapun kemudian mengenal terminologi “*data-driven decision making*”.





Makin banyaknya kebutuhan akan pengujian dan pengukuran menghasilkan kondisi di mana data adalah kunci. Dalam diskusi-diskusi, mereka yang membawa data menjadi seolah lebih paham. Data pula yang membuat narasi lebih dipercaya. W. Edwards Deming, seorang profesor statistika, pernah mengungkapkan: *"In God we trust, all others must bring data"*, hanya untuk menekankan pentingnya data dalam ilmu pengetahuan dan pengambilan keputusan.

Apapun bentuknya, data pada dasarnya adalah kumpulan catatan peristiwa masa lalu.

Saya tidak menemukan data yang bisa memprediksi iPhone akan *booming* saat rilis perdananya tahun 2007 silam karena memang tidak ada data historis sebelumnya. Sebagai *first mover* di bidangnya, kisah sukses iPhone merupakan fakta nyata bagaimana data kadang tidak selalu dibutuhkan. Cerita lain yang tak kalah mencengangkan adalah bagaimana Nokia sebagai pemimpin pasar ponsel kala itu harus tumbang meski data penjualannya dalam beberapa tahun sedang menunjukkan tren positif. Bahkan CEO Nokia waktu itu, Jorma Ollila, mengucapkan kata-kata perpisahan yang sangat emosional, *"We didn't do anything wrong, but somehow we lost"*. Sekali lagi, ternyata ada kalanya data juga tidak menjamin pengambilan keputusan yang tepat.

Dari sisi proses, data yang tersaji di depan kita sebenarnya bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-

tiba. Terlebih untuk keperluan analisis, sebuah data harus melewati beberapa tahap mulai dari *pre-processing*, seperti *crawling data*, ETL, dan *data cleaning* hingga siap untuk di-*modelling*.

Dalam dunia nyata, sangat jarang kita temukan data yang terkumpul dengan sempurna, sehingga dalam *data modelling* seringkali dibumbui beberapa asumsi dan manipulasi yang hampir tidak pernah diungkap secara gamblang dalam publikasinya, seolah-olah data itu tanpa cela. Output yang dihasilkan pun masih harus dianalisis yang tak luput dari unsur subyektivitas, apalagi variabel data yang terlibat dinamis. Berbagai unsur pengganggu tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas dan akurasi data, padahal adanya data itu untuk mempersempit probabilitas dari berbagai alternatif kemungkinan. Tentu kita tidak ingin pilihan terakhir yang tersisa justru merupakan pilihan yang salah, bukan? Oleh karenanya, sebaiknya kita juga terbuka pada hal-hal yang tidak bisa dihitung, sebab tidak semua yang *unquantified* itu tidak akurat.

### **Jangan terjebak Data Fetishism**

Kisah Nokia tersebut menjadi bukti bagaimana kita dapat terjebak dalam *quantification bias*, sebuah kecenderungan untuk selalu meletakkan sesuatu berdasarkan data. Padahal banyak hal bisa terjadi justru ketika belum ada datanya. Hal yang lebih parah akan terjadi jika kita sampai terjebak pada yang namanya *Data Fetishism*,

yakni terlalu mendewakan data dan menganggap semua hal yang ditunjukkan data adalah valid. Dalam beberapa kasus bahkan sampai enggan mengambil keputusan karena ketiadaan data.

Padahal jika menilik cara kerja otak kita, adanya data justru akan membawa banyak potensi bias dalam pengambilan keputusan. Manusia adalah objek dari banyak bias sosial dan psikologis.

Pernahkah Pembaca sadari bahwa kita cenderung menyukai data dan informasi yang sejalan dengan pemikiran kita dan mengabaikan hal lain yang kontra? Inilah yang disebut *conformity bias*. Sebagai contoh, bagi mereka penggemar mazhab bumi datar akan terus menyangkal meskipun disodori foto bulatnya bumi yang diambil NASA.

Hal lain yang tak kalah menakutkan adalah *framing data* itu sendiri. Jangan pernah menelan mentah-mentah sebuah data karena belum tentu yang tertulis adalah hal yang sebenarnya. Faktor politis dan agenda tertentu “si pembuat data” terkadang bisa menutupi fakta yang sesungguhnya. Contohnya adalah agenda pemilu yang seringkali menjadi ajang klaim kemenangan masing-masing kandidat sebelum pengumuman resmi KPU. Metode *Quick Count* yang sama, menghasilkan output berbeda tergantung agenda mana yang ingin ditampilkan.

Semua dipengaruhi oleh *framing data*, meskipun pengolahan datanya sama-sama ilmiah.

### ***Big Data vs Thick Data***

*Big Data* memang menjadi primadona dalam pengambilan keputusan karena prinsipnya berupa data populasi, tentu insightnya akan terlihat lebih jelas tanpa harus memikirkan tentang metode sampling atau potensi deviasinya.

Sayangnya, dalam banyak hal seringkali kita dihadapkan pada ketiadaan data karena memang belum ada kejadian nyata dan kita dituntut untuk tetap mengambil keputusan. Di sini Tricia Wang, seorang ethnographer Nokia, mengusulkan untuk menggunakan *Thick Data*. Ide dasarnya adalah walaupun *insight* yang dihadirkan tidak besar, tapi kualitasnya tinggi. Artinya, insting para pengambil kebijakan sangat diperlukan dan itu menjadi jalan keluar dari ketiadaan data.

Pada akhirnya, ada tidaknya data hendaknya tak menghalangi kita dalam mengambil keputusan. Semakin sering kita mengagungkan data, akan banyak keputusan penting tertunda karena ketiadaan data. Padahal, banyak fenomena menarik di dunia terjadi jauh sebelum adanya data. Ditambah lagi, lingkungan yang dinamis akan membuat data menjadi cepat usang. Bisa jadi data yang kita peroleh sekarang menjadi tak berarti lagi pada detik berikutnya.

Belajar dari Konsumen Jepang:

# Orientasi Kualitas, Tuas Industri Dalam Negeri

**Daniel Wawone Y.B.,**  
Auditor pada Deputi Bidwas PIP Bidang Pohukam PMK

*Berbeda dengan Indonesia, Pemerintah Jepang tidak berupaya menggenjot GDP melalui peningkatan belanja pemerintah untuk penggunaan produk dalam negerinya.*

Pasar domestik tidak menjadi incaran Pemerintah Jepang dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Berdasarkan data yang diperoleh, sekitar 99,7% perusahaan di Jepang berbentuk industri kecil dan menengah (*small and medium enterprises/SME*). Penyusun kebijakan publik di Jepang sangat menyadari pentingnya peran SME dalam mendorong perekonomian. Namun,

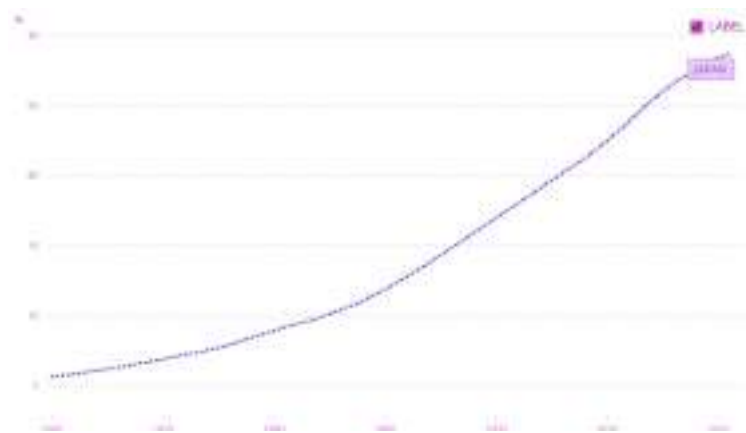
dukungan Pemerintah Jepang untuk SME tidak melalui belanja pemerintah yang berpihak pada produk domestik.

## Pasar domestik yang semakin menyusut

Menurut Atsushi Toyonaga, CEO SME Support Japan, dengan

melihat situasi yang terjadi di Jepang sudah seharusnya SME Jepang tidak mengincar pasar domestik sebagai upaya ekspansi bisnisnya. Jepang saat ini mengalami penurunan angka kelahiran sehingga menciptakan fenomena 'populasi yang menua' (*aging population*). Persentase populasi masyarakat lanjut usia di Jepang lebih besar dibandingkan di negara lain. Menurut Biro Statistik, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, pada tahun 2014 sekitar 25% dari total populasi masyarakat Jepang berusia lebih dari 60 tahun. Angka ini diperkirakan akan semakin besar di tahun

2030 hingga 2050. Pertumbuhan masyarakat berusia lanjut di Jepang akan mengurangi ukuran pasar domestik Jepang, sehingga untuk menjamin keberlanjutan bisnisnya SME harus mengekspansi ke tempat lain. Untuk itu, upaya dukungan SME dilakukan Pemerintah Jepang melalui berbagai insentif yang mendorong perusahaan tersebut mengeksport komoditasnya (pajak, subsidi, ataupun insentif khusus).



**Grafik pertumbuhan masyarakat berusia 65 ke atas (% dari total populasi) di Jepang 1960-2021**

sumber: World Bank. Population Ages 65 and above (% of total population) – Japan. Diakses tanggal 1 Agustus 2022 melalui <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=JP>

### Perjalanan panjang produk berkualitas buatan Jepang

Setelah perang dunia kedua, Jepang merupakan salah satu negara yang mengalami percepatan pemulihan ekonomi. Bahkan banyak ahli ekonomi dunia mereferensi masa pemulihan ekonomi Jepang setelah perang sebagai "Keajaiban Ekonomi Jepang" (*Japan Economic Miracle*). Pada masa itu, Jepang banyak memproduksi barang elektronik yang sesungguhnya sudah banyak diproduksi oleh produsen dari Amerika Serikat dan Eropa. Barang-barang tersebut seperti peralatan rumah tangga hingga mobil. Konsep produksi Jepang tidak sekadar imitasi, melainkan

meningkatkan kualitas barang tersebut hingga memiliki keuntungan kompetitif. Saat itu, barang-barang domestik Jepang pun dapat diproduksi lebih murah dan dalam jumlah besar. Sekitar periode 1950-an, konsumen internasional memiliki persepsi terhadap barang-barang yang dibuat oleh Jepang sebagai barang murah dengan kualitas rendah. Namun, secara berangsur-angsur, anggapan tersebut dapat diubah. Banyak konsumen dunia yang pada akhirnya menganggap bahwa



barang buatan Jepang sebagai salah satu barang berkualitas tinggi. Terlebih di tahun 1980-an, Pemerintah Amerika Serikat mulai “menyerang” Jepang dengan berbagai kebijakan ekonominya karena barang buatan Jepang yang mulai merambah di wilayah AS.

### **Preferensi masyarakat Jepang untuk barang berkualitas**

Perekonomian Jepang yang bangkit setelah perang dunia kedua telah membentuk preferensi konsumen Jepang. Kebangkitan ekonomi Jepang turut mendorong daya beli masyarakatnya. Konsumen Jepang rela membayar lebih mahal untuk barang yang berkualitas dan tahan lama. Konsumen sangat bergantung pada hasil ulasan konsumen lainnya dan faktor harga; semakin mahal harga suatu barang, sudah pasti kualitas barang tersebut akan semakin bagus. Para pengusaha Jepang pun sudah menyadari perilaku konsumen Jepang ini. Akibatnya, banyak dari para pengusaha tersebut yang terdorong untuk membuat barang yang dapat memenuhi kebutuhan kualitas masyarakat Jepang dengan kualitas yang tinggi. Para pengusaha Jepang selalu mengupayakan untuk tidak melakukan kesalahan dalam bisnis, misalnya produk cacat yang tidak sengaja terjual, sebab kesalahan sekecil apapun akan berimplikasi pada keberlangsungan usaha mereka.

Selain itu, konsumen Jepang juga terkenal “kejam”; ketidakmampuan suatu usaha untuk memenuhi

kebutuhan kualitas konsumen Jepang akan menyebabkan kebangkrutan akibat buruknya *review* yang diberikan konsumen terhadap produk yang dijual. Inilah yang membuat industri Jepang berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang berkualitas apabila ingin memasuki pasar domestik Jepang. Persepsi atas kualitas barang yang akan dijaga oleh para pengusaha Jepang membuat istilah “Made in Japan” sebagai salah satu jaminan produk berkualitas. Secara umum, masyarakat Jepang akan cenderung memilih barang-barang yang dibuat di Jepang ketimbang barang yang dibuat di negara lain, kecuali untuk barang-barang yang menurut konsumen Jepang merupakan spesialisasi negara penghasil. Misalnya, *wine* yang menurut konsumen Jepang akan dihasilkan terbaik oleh Perancis, sirup maple yang dihasilkan terbaik oleh Kanada, dan seterusnya.

### **Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah Jepang tetap mengutamakan barang berkualitas**

Preferensi untuk barang berkualitas juga tercermin dari pelaksanaan PBJ di pemerintahan Jepang. Pemerintahan Jepang mengusung pelaksanaan PBJ yang *fair* dan kompetitif. Para pelaku usaha, baik domestik maupun asing, yang ingin berkompetisi pada PBJ Pemerintah Jepang harus menjamin kualitas barang dan jasa yang disediakan. Bagi Pemerintah Jepang, keberpihakan pada produk domestik tanpa memperhatikan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan akan mencoreng prinsip pelaksanaan PBJ. Mencontoh praktik di Jepang tersebut, Indonesia perlu menilik kembali pengendalian kualitas pada industri dalam negerinya. Oleh karena itu agar semakin bangga dengan buatan Indonesia, selain mendorong perekonomian usaha domestik, pemerintah juga perlu untuk menggencarkan peningkatan kualitas produk-produk maupun layanan yang dihasilkan oleh produsen lokal.

**Pertanyaan:**

Mohon informasi terkait pelatihan penyetaraan Auditor Ahli Muda dan Auditor Ahli Madya. Terima kasih.

**NN, Inspektorat Kominfo**

**Jawaban:**

Sehubungan dengan Surat Edaran Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Nomor SE-5/K/JF/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor bagi Pejabat Administrasi yang Disetarakan dalam Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklatwas akan memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Penyetaraan Auditor Ahli Muda/ Madya dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Peserta pelatihan adalah Pejabat Administrasi yang telah disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor sesuai PermenPAN RB Nomor 29 Tahun 2019 dan PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2021;
2. Mekanisme pelatihan pembekalan dan pelatihan penyetaraan untuk setiap jenjang diatur sebagai berikut:
  - a. Setiap peserta Pelatihan Penyetaraan Jabatan Penjenjangan Auditor Ahli Muda dipersyaratkan mempunyai sertifikat Auditor Ahli Pertama atau sertifikat lulus Pelatihan Pembekalan I. Untuk mendapatkan sertifikat lulus Pelatihan Pembekalan I, para peserta wajib mengikuti Pelatihan Pembekalan I.
  - b. Setiap peserta Pelatihan Penyetaraan Jabatan Penjenjangan Auditor Ahli Madya dipersyaratkan mempunyai sertifikat Auditor Ahli Muda atau sertifikat lulus Pelatihan Pembekalan II. Untuk mendapatkan sertifikat lulus Pelatihan Pembekalan II, para peserta wajib mengikuti Pelatihan Pembekalan II.
  - c. Pusat Pembinaan JFA BPKP akan melakukan verifikasi dan penetapan peserta pelatihan pembekalan serta penetapan peserta pelatihan penyetaraan berdasarkan persyaratan yang di-*upload* calon peserta di aplikasi registrasi *online*.
  - d. Pelaksanaan kelas Pelatihan Penyetaraan Jabatan Penjenjangan Auditor Muda dan Madya akan dilaksanakan setelah selesainya Pelatihan Pembekalan I dan II.
3. Registrasi Pelatihan Pembekalan I dan Pelatihan Penyetaraan Jabatan Penjenjangan Auditor Ahli Muda

Persyaratan Pelatihan Pembekalan I dan Pelatihan Penyetaraan Jabatan Penjenjangan Auditor Ahli Muda melakukan registrasi *online* pada alamat: <http://registrasi.bpkp.go.id/registrasi> dengan kode kelas **42**, dengan meng-*upload* persyaratan-persyaratan, yaitu:

- a. Surat Usulan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP;
- b. SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui mekanisme penyetaraan;
- c. SK Pelantikan dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui mekanisme penyetaraan;
- d. SK Pangkat terakhir;
- e. Sertifikat Auditor Ahli Pertama (bagi peserta yang memiliki).

4. Registrasi Pelatihan Pembekalan II dan Pelatihan Penyetaraan Jabatan Penjenjangan Auditor Ahli Madya

Persyaratan Pelatihan Pembekalan II dan Pelatihan Penyetaraan Jabatan Penjenjangan Auditor Ahli Madya melakukan registrasi *online* pada alamat: <http://registrasi.bpkp.go.id/registrasi> dengan kode kelas **43**, dengan meng-*upload* persyaratan-persyaratan yaitu:

- a. Surat Usulan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP;
- b. SK pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui mekanisme penyetaraan;
- c. SK pelantikan dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui mekanisme penyetaraan.
- d. SK pangkat terakhir;
- e. Sertifikat Auditor Ahli Muda (bagi peserta yang memiliki).

5. Mekanisme Pelatihan Pembekalan dan Pelatihan Penyetaraan

Pelatihan pembekalan I/II menggunakan fasilitas kelas pelatihan *massive open online course* (mooc) dengan pembiayaan pelatihan per peserta sebesar Rp300.000,00. Pelatihan penyetaraan dilaksanakan dengan metode tatap muka, dan dibebankan pada anggaran STAR-AF Pusdiklatwas BPKP Tahun 2022 sesuai dengan jumlah kuota peserta penyetaraan yang terdaftar pada aplikasi registrasi *online*.

6. Jadwal

Jadwal pendaftaran, verifikasi, pelatihan pembekalan dan pelatihan penyetaraan sebagai berikut:

| No | Aktivitas                                              | Batas Akhir          |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Pendaftaran Pembekalan I/II                            | 25 Maret 2022        |
| 2  | Verifikasi dan penetapan peserta Pembekalan I/II       | 1 April 2022         |
| 3  | Pelatihan Pembekalan I/II via mooc                     | 6 April – 6 Mei 2022 |
| 4  | Verifikasi dan penetapan peserta Pelatihan Penyetaraan | 25 Mei 2022          |
| 5  | Pelatihan Penyetaraan                                  | Juni – Agustus 2022  |

**Salam,**  
**Kapusdiklatwas, Arief Tri Hardiyanto**

---

**Pertanyaan:**

Mohon info terkait syarat-syarat pendaftaran Pelatihan Fungsional Auditor Terampil dan Ahli Pertama bagi perwira TNI. Terima kasih.

**Perwira di TNI**

**Jawaban:**

Merujuk Peraturan Kepala Pusbin JFA No 477 Tahun 2017 tentang Persyaratan Diklat Fungsional Auditor bagi Anggota TNI bisa dirinci sebagai berikut.

Pelatihan Fungsional Auditor Terampil:

1. Berijazah paling rendah diploma III atau yang sederajat yang diakui secara kedinasan atau kursus dasar kecabangan;
2. Usia paling tinggi 53 tahun saat diusulkan;
3. Pangkat paling rendah Letnan Dua;
4. Diusulkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan (Ttkfunghan) Kementerian Pertahanan atau Inspektur Jenderal TNI atau Inspektur Jenderal TNI AD/AL/AU atau asisten personil TNI AD/AL/AU.

Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama:

1. Berijazah paling rendah sarjana/diploma IV atau yang sederajat yang telah diakui secara kedinasan atau pendidikan lanjutan Perwira (DIKLAPA) bagi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) atau Sekolah Kesatuan Komando Angkatan Udara (SEKKAU) bagi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
2. Usia paling tinggi 56 tahun pada saat diusulkan;
3. Pangkat paling rendah mayor;
4. Diusulkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan (Ttkfunghan) Kementerian Pertahanan atau Inspektur Jenderal TNI atau Inspektur Jenderal TNI AD/AL/AU atau asisten personil TNI AD/AL/AU.

**Salam,  
Kapusdiklatwas, Arief Tri Hardiyanto**

---

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk Anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Iwan Agung Prasetyo dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Arief Tri Hardiyanto. Surat yang Anda layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke [wartapengawasan@gmail.com](mailto:wartapengawasan@gmail.com) atau redaksi **Warta Pengawasan**.



## SABRINA DAN BANYAK JALAN MENUJU IKIGAI

*Pernah bertualang hingga makan ulat sagu, berleenggak lenggak di panggung Puteri Indonesia, dan kini menjadi mahasiswi di Massachusetts Institute of Technology (MIT) sekaligus co-founder dan CEO Natuno Lab; **Sabrina Woro Anggraini Listyo**, perempuan muda dengan segudang prestasi ini akan membagikan kisah inspiratifnya.*

Punya ketertarikan di bidang teknologi, Sabrina justru pada awalnya dikenal publik di kancah hiburan tanah air sebagai *host* acara petualang dan Finalis Puteri Indonesia. Ia berpendapat, di era persaingan yang sangat ketat ini, mengombinasikan berbagai keterampilan dan kompetensi adalah hal yang unik dan *stand out*. Meskipun demikian, ia menggarisbawahi pentingnya menguasai bidang tertentu yang menjadi spesialisasinya secara maksimal. Hal ini ia buktikan dengan meraih prestasi akademis dan menjuarai berbagai kompetisi bidang teknologi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Saat ini, Sabrina tengah sibuk mengembangkan perusahaan rintisan (*startup*) Natuno Lab yang bergerak di bidang konsultasi desain produk untuk produk digital. Ia juga tercatat turut menggarap *startups* terkemuka di Indonesia. Sebagai penerima beasiswa dari Lembaga Penyedia Dana Pendidikan (LPDP), Sabrina tengah mendalami *Sistem Design and Management* di MIT loh!

Nah, khusus untuk Pembaca Warta Pengawasan, Sabrina menceritakan bagaimana kiat merumuskan target jangka panjang, serunya berproses dari karyawan menjadi *entrepreneur*, serta tips mengatasi demotivasi hingga menemukan kedamaian dalam IKIGAI. Penasaran kan? Yuk, simak!

**Sabrina konsisten menekuni bidang teknologi, apakah bidang ini memang menjadi *dream job* Sabrina sejak kecil?**

Semasa kecil, sebenarnya cita-cita saya masih berubah-berubah. Akan tetapi, saat SMA saya mulai menyadari adanya *feeling* di bidang teknologi. Biasanya anak SMA kalau punya uang jajan digunakan untuk jalan-jalan ke mall, sementara saya lebih memilih ke warnet (warung internet) karena tertarik dengan “dunia lain” di internet. Kemudian saya mantap memperdalam ilmu ini dengan kuliah Jurusan Ilmu Komputer. *Alhamdulillah* saya diterima di Universitas Gajah Mada (UGM).

Karena bidang ini cukup luas, saya merasa perlu untuk menemukan fokus dan menggali kompetensi, mengeksplorasi diri melalui kompetisi dan proyek-proyek selama kuliah. Setelah lulus dan bekerja di perusahaan IT selama dua tahun, saya pun memberanikan diri membangun perusahaan sendiri di bidang konsultasi produk desain untuk produk digital, yaitu Natuno Lab. Karena saya merasa perlu banyak belajar untuk mengelola perusahaan ini, saya kuliah di MIT mengambil Jurusan *Sistem Design and Management*. Harapannya, saya bisa memperdalam ilmu manajemen dan bisnis tanpa meninggalkan sisi *engineer* atau teknisnya.

**Ketika *apply* beasiswa, pengalaman apa yang Sabrina *highlight* agar bisa mengantarkan Sabrina ke kampus impian?**

Yang dipertimbangkan dalam seleksi beasiswa bukan hanya IPK atau *achievement* akademik maupun nonakademik, tetapi juga esai yang menceritakan alasan, pengalaman, serta karya nyata kandidat yang berkaitan dengan jurusan yang diinginkan. Minat saja tidak cukup, calon *awardee* harus memahami tujuan apa yang ingin dicapai jika nantinya mendapatkan kesempatan beasiswa. Dengan pemahaman ini, lembaga donor meyakini bahwa beasiswa akan membuat penerimanya berkembang. Saya rasa, ini bukan sesuatu yang bisa dibuat secara instan.



MIT sudah menjadi kampus impian saya sejak lama, walaupun saya baru terpikir untuk melanjutkan jenjang pendidikan S2 dua tahun yang lalu. Saya terbantu dengan pengalaman-pengalaman saya yang relevan dengan jurusan yang saya inginkan. Saya pernah menjadi karyawan di perusahaan IT dan sudah merintis Natuno Lab sehingga saya betul-betul memahami apa saja *sih* yang ingin saya kembangkan.

### Tidak berkecimpung di bidang manajemen bisnis, bagaimana Sabrina bisa mantap membangun Natuno Lab? Apa yang pertama kali Sabrina siapkan saat merintis Natuno Lab?

Saya menjadi profesional dengan memulai dari nol, menjadi karyawan di perusahaan IT dan datang dengan *mindset* belajar. Di sana saya tidak hanya mencari bos, tetapi mencari sosok *leader* atau *role model* dengan mengamati bagaimana cara mereka bekerja, berkolaborasi, membangun relasi, dan memimpin tim. Prinsip saya saat menjadi *fresh graduate* adalah *keep humble*, proaktif memberikan nilai tambah, dan hasil yang lebih dari apa yang ditugaskan, serta mencari lingkungan pertemanan yang positif. Saya tidak menjadikan uang sebagai pertimbangan utama dalam bekerja, melainkan pengalaman dan peluang untuk belajar.

Transisi dari pekerja menjadi pengusaha pun tidak mudah. Saya mencicipi dunia *freelance* terlebih dahulu sambil bekerja untuk melihat kemampuan saya dan “tes ombak” apakah ide saya ini sesuai dengan minat pasar sambil mempersiapkan *emergency fund*.

Kemudian, selain memahami *market* dan produk, menurut saya yang terpenting adalah membangun tim yang solid. Saya mencari *co-founder* yang tepat; partner yang tidak hanya saling melengkapi secara *skill*, tetapi juga cocok secara *personality*, kompeten, *track record*-nya baik, dan punya *willingness to learn*.

*Mau nggak mau* saya harus menguasai *marketing*, *finance*, hingga *legal*. Meskipun bisa meng-*hire*

orang lain, sebagai pemimpin saya harus punya pemahaman secara general dan mampu memimpin tim. Yang saya lakukan adalah mencari mentor untuk belajar dari pengalaman mereka, memperluas jejaring, mengikuti *online courses* untuk belajar manajemen bisnis, mengikuti seminar dan *workshop basic* cara membangun usaha, serta berani *trial* dan eror. Belajar tidak hanya melalui pendidikan formal, bisa juga di luar kelas. Menurut saya, S2 ini adalah pelengkap ilmu. Tantangan yang mengagetkan saya saat itu soal bagaimana mengelola tim. Ternyata mengelola tim susah *banget* ya. Tidak cukup hanya memimpin, tetapi saya harus memotivasi mereka dan menyadari bahwa mereka punya kepentingan masing-masing. Dalam perjalanannya, saya harus adaptif.

### Bagaimana pengalaman pertama kali mendapatkan klien di Natuno Lab? Apakah Natuno Lab juga terdampak pandemi?

Tantangan awal tentunya bagaimana menepis anggapan bahwa Natuno belum kredibel. Saya dan *co-founder* berkali-kali *sales meeting* dengan banyak orang, tetapi tidak *goal*.

Mudah untuk memilih menyerah saat itu, tetapi kami konsisten.

Banyak cara untuk mendapatkan klien pertama, misalnya dari relasi, *friend of a friend*, media sosial, dll.

Awal pandemi kami sempat khawatir dan merasakan dampak negatif karena banyak perusahaan yang *cut budget* mereka dan kami mengira mereka tidak akan memakai jasa konsultan atau *third party* lagi.

Akan tetapi, pandemi ternyata



menyadarkan semakin banyak perusahaan atau organisasi untuk *go digital*. Kemudian, banyak pula *startup* dan perusahaan rintisan yang ingin meng-*create* produk, tetapi belum memahami bagaimana membuat produk yang mudah digunakan oleh masyarakat, akhirnya berkonsultasi ke Natuno. Ini membuka banyak peluang untuk Natuno.

### **Bagaimana manajemen waktu, energi, dan keuangan untuk kuliah sambil membesarkan Natuno Lab ini?**

Saya kurang setuju dengan istilah *work life balance* karena menurut saya akan susah untuk “*fifty-fifty*”. Setiap kehidupan punya fase yang berbeda dan setiap fase punya prioritas yang berbeda. Bukan pilihan antara karier atau keluarga, misalnya, tapi bagaimana keduanya bisa melengkapi satu sama lain, terutama bagi perempuan yang harus multiperan.

Kemudian, menurut saya sangat penting memiliki *side hobby*. Dari kesibukan-kesibukan dan hobi ini, terdapat nilai-nilai yang bisa dipelajari, bisa diimplementasikan di lingkungan pekerjaan, bahkan menjadi sesuatu yang berdampak besar.

Saya sependapat dengan IKIGAI, konsep hidup di mana kita menemukan titik tengah antara hal yang kita suka (apa yang menjadi *passion* kita), hal yang dibutuhkan dunia (masalah yang penyelesaiannya butuh kontribusi kita), hal yang kita kuasai (bidang kompetensi kita), dan hal yang kita lakukan untuk mendapatkan bayaran. Saya belajar

bahwa menemukan IKIGAI ini membutuhkan proses.

Hal lain yang saya pelajari dari perjalanan saya ini adalah pentingnya fokus pada proses, bukan hanya tujuan. Saya mengutip dari buku James Clear berjudul “*Atomic Habit*”, bahwa jika setiap hari kita melakukan sesuatu dengan lebih baik 1 persen saja, selama satu tahun kebaikan tersebut akan terakumulasi menjadi 365 persen atau ada peningkatan secara signifikan. Oleh karena itu, kita perlu membuat sistem atau melakukan kebiasaan-kebiasaan baik setiap hari, tidak hanya fokus pada tujuan. Menurut saya, ini sangat *practical* dan *inspiring*.

### **Pernahkah merasakan demotivasi? Bagaimana Sabrina meng-encourage diri saat berada pada titik itu?**

Demotivasi sering banget! Saya ambil waktu untuk benar-benar *acknowledge* perasaan itu, merasakan emosinya, bukan menolak. Jangan *denial* karena nanti akan menjadi bom! Supaya perasaan saya lebih *clear*, saya merefleksi diri atau berdiskusi dengan orang yang bisa dipercaya untuk memberikan pandangan yang lebih objektif. Saat emosi sudah lebih baik, saya menyusun rencana untuk bangkit.

### **Apa rencana Sabrina selain mengembangkan Natuno Lab?**

Meskipun sudah *setting goal*, tetapi sebenarnya *goal* saya berubah-ubah. *Goal* besarnya tentu ingin lanjut menjadi pengusaha, mengembangkan Natuno. Namun demikian, tidak menutup



kemungkinan, saya nantinya akan membuat usaha-usaha baru dengan semakin banyaknya hal-hal baru yang saya *explore*. Bisa jadi *goal*-nya berubah. Intinya, *it's okay goal* berubah, tetapi nilai-nilainya tetap sama.

### Apa pesan Sabrina untuk calon-calon *entrepreneur* muda Indonesia?

Ketika remaja, saya senang sekali menentukan *goals*. Sayangnya, kesalahan saya saat itu, saya tidak merumuskan bagaimana prosesnya. Penting untuk memiliki tujuan jangka panjang dan menyadari *skill* apa yang harus kita kuasai untuk mencapai tujuan tersebut. Dari situ, kita bisa mengetahui *resource* apa kita butuhkan dan bisa meng-*highlight* fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di sekeliling kita untuk membantu mewujudkan impian tersebut, misalnya komunitas, pelatihan, dll.

Kemudian, lakukan apa yang menjadi panggilan hati. *Career path* saya bisa dibilang *anti-mainstream*. Saya sempat menjadi *host* acara petualang dan menjadi Puteri Indonesia, dua hal yang berbeda sekali dengan dunia IT. Dari sini saya belajar bahwa *career path* tidak selalu harus linear, meskipun saya setuju bahwa setiap orang perlu punya spesialisasi, saya pun punya spesialisasi *digital design*. Menurut saya, di era serba cepat dan persaingan ketat ini, cara kita bisa *stand out* dari ribuan orang-orang sukses dan menginspirasi adalah dengan menjadi unik, dan ini bisa dilakukan dengan mengombinasikan beberapa



kemampuan atau bidang.

Di MIT misalnya, saya menemui tim yang menggabungkan prinsip biologi dan arsitektur. Tim ini membuat bangunan arsitektur yang ramah lingkungan. Dua bidang yang digabungkan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Keunikan bisa digali, memberikan peluang, dan menjadi nilai tambah di tempat kita bekerja. Terakhir yang tidak kalah penting, peran *support system* sangat penting dalam pencapaian tujuan kita. ***You are the average of the five people you spend the most time with***, kamu adalah akumulasi dari lima orang terdekat. Saya belajar pentingnya berada pada lingkungan yang bisa mendorong kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, sangat penting memilih lingkungan profesional yang sehat.

(Ayu Isni Arum)

## Sisi Lain Perjalanan Ekonomi Asia Timur



Ilustrasi  
Diana Pertiwi

**B**uku ini adalah kajian komprehensif tentang pertumbuhan ekonomi Asia Timur, berisi diskusi mendalam tentang mengapa beberapa negara berhasil mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, sedangkan beberapa gagal. Pesan utama buku ini adalah menjelaskan tingkat pertumbuhan PDB yang kuat di beberapa negara Asia Timur. Terdiri dari enam bab, buku ini secara runut memaparkan dasar-dasar sejarah pembangunan Asia

Timur, pertumbuhan Asia Timur, intervensi pemerintah versus Laissez-Faire di Asia Timur Laut, gambaran kinerja ekonomi di Asia Tenggara, isu-isu Cina dan Vietnam, dan eksplorasi waktu dan alasan mengapa periode pertumbuhan yang cepat ini telah berakhir.

Buku ini mencoba menjawab tiga pertanyaan mengapa beberapa ekonomi di Asia Timur dan Tenggara mencapai tingkat pertumbuhan yang jarang diamati di tempat lain di dunia, mengapa beberapa ekonomi di kawasan itu berkinerja lebih baik daripada yang lain, dan mengapa ekonomi terkaya akhirnya semua melambat?

Terhadap kajian Perkins dalam bukunya ini, terdapat empat hal yang menarik untuk dikritisi sebagai berikut.

**1. Perkins tidak membahas lebih jauh tentang ketimpangan dan kemiskinan.**

Perkins (2013) berpendapat bahwa membahas ketimpangan tidak penting untuk argumen yang dia buat di buku ini (hal. 9). Namun, beberapa penelitian telah menyelidiki hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Ada yang berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan membuat orang bekerja lebih dari biasanya dan meningkatkan produktivitasnya sehingga sebenarnya baik dan memberikan dorongan pertumbuhan (Barro 200 dikutip dalam Bastagli et al 2012). Sebaliknya, ketimpangan kesenjangan pendapatan yang besar ternyata berkontribusi terhadap inefisiensi jika disertai dengan ketidaksetaraan kesempatan (Beddoes 2012, hlm. 4).

Perkins (2013) memberikan wawasan baru kepada pembaca ketika beberapa negara mencapai pertumbuhan tinggi dengan langkah yang menjauh dari titik konsensus Washington; dalam hal ini Korea Selatan dan Taiwan. Meski pada akhirnya keduanya menyambut baik liberalisasi. Namun, Perkins (2013) tidak memitigasi proses masing-masing negara dan tidak membandingkannya dengan konsensus Washington. Akan lebih baik untuk melihat negara mana yang menerapkan poin dari konsensus itu dan melihat hasil darinya. Pentingnya melakukan ini adalah untuk melihat apakah ada negara Asia Timur yang menerapkan itu dan memberikan wawasan baru bagi kebijakan ekonomi. Konsensus ini awalnya keluar pada tahun 1989; itu adalah serangkaian reformasi ekonomi untuk negara-negara berkembang (Symoniak 2011, hlm. 1).

Selanjutnya, buku ini juga tidak membahas tentang kemiskinan dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Belakangan ini, keterkaitan antara kemiskinan, ketimpangan dan pembangunan menjadi isu penting ketika proporsi penduduk yang hidup di garis kemiskinan menjadi separuhnya menjadi salah satu tujuan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000 (Gaiha et al. 2006). Mungkin bermanfaat untuk menarik setidaknya statistik kemiskinan di wilayah ini pada awal tahun 1960, pada krisis keuangan dan gambaran hari ini, untuk memberikan paparan yang lebih luas tentang hubungan antara pertumbuhan tinggi dan pengentasan kemiskinan mengenai batasan periode analisis di buku ini, yang menganalisis pertumbuhan Asia Timur antara 1960 hingga 1990.

**2. Perkins membantah argumen tentang pendidikan.**

Dalam Bab 2, Perkins berpendapat bahwa negara-negara dengan basis pendidikan rendah sering melebih-lebihkan pentingnya pendidikan untuk pertumbuhan dan produktivitas (hal. 64). Dia berpendapat bahwa estimasi kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan didasarkan pada metode yang tidak tepat, yaitu dengan mengalikan peningkatan

pendidikan angkatan kerja dengan produktivitas marjinal tenaga kerja. Menurut Perkins (2013, hlm. 64), pendekatan ini hanya akan menguntungkan negara berpenghasilan tinggi, sedangkan untuk negara berpenghasilan rendah dengan tingkat buta huruf yang tinggi, metode ini akan meremehkan kontribusi pendidikan. Selanjutnya, Perkins menyatakan bahwa ada formulasi lain dari persamaan ini, tetapi tidak ada literatur yang menjelaskan rumusan tersebut untuk sejumlah besar negara.

Salah satu rumusan yang dilakukan oleh Permani (2008) yang mengonstruksi rumusan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan di Asia Timur tersebut. Ia menurunkan model ekonometrik dari model pertumbuhan Solow dan mempresentasikan tiga variabel eksogen, yaitu pangsa investasi, pertumbuhan penduduk, dan PDB per kapita dari tahun 1965 hingga 2000. Rata-rata sekolah penduduk di atas 25 diambil dari penelitian lain. Permani (2008) menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, posisi pendidikan menjadi lebih jelas di Asia Timur. Studi lain oleh Glewwe et al. (2007) menggunakan pendekatan yang hampir sama yang menganalisis dampak tahun sekolah menengah orang dewasa yang meninjau

dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi menemukan bahwa peningkatan tingkat pendidikan di negara berkembang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan. Namun, kesimpulannya mirip dengan Perkins bahwa ada masalah ekonometrik dalam analisis. Dengan demikian, perlu adanya kajian lebih lanjut untuk merumuskan model *robust*.

### 3. Perkins mengklaim bahwa Hong Kong adalah contoh paling jelas dari pendekatan *Laissez Faires* dan fenomena *angsa terbang Jepang*.

Topik Bab 3 adalah intervensi pemerintah versus *Laissez-faire*. Mungkin bermanfaat jika Perkins terlebih dahulu memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pendekatan *Laissez Faire* (hal. 92-93) dan menjelaskan lebih lanjut tentang istilah *angsa terbang* (hal. 11). Dalam Bab 3, Perkins (2013) mengatakan bahwa Hong Kong mungkin merupakan contoh paling murni dari ekonomi *Laissez Faire* di paruh kedua abad 20. Tidak ada hambatan tarif pada komoditas yang datang ke Hong Kong, tidak ada bank sentral, mata uang yang dapat dikonversi adalah beberapa kebijakan yang telah dibuat di Hong Kong. Namun, Wilderman (2012) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Hong Kong disumbangkan oleh geopolitik, intervensi negara, dan dukungan dari komunis China. Singkatnya, Bab 3 dapat diperbaiki dengan penjelasan lebih lanjut tentang *Laissez Faire*, implikasinya atau manfaat dan kerugiannya dan mungkin membuat analisis komprehensif tentang *angsa terbang*.

### 4. Buku ini terlalu mengandalkan pembahasan industrialisasi

Reformasi di sektor pertanian, urbanisasi dan inovasi teknologi jarang dibahas.



Sebuah studi kasus dapat diambil dari Indonesia dalam mencapai produksi beras swasembada pada tahun 1980-an dan pembangunan pedesaan di Malaysia pada tahun 1960-an. Dalam bab terakhir, Perkins juga melakukan diskusi yang tidak seimbang dengan sebagian besar pembicaraan tentang China dan meninggalkan tantangan negara lain.

### Penutup

Ini adalah buku yang ditulis dengan baik dan sangat bagus dengan topik pembangunan ekonomi. Perkins menggunakan pendekatan analitis dan memberikan gambaran yang baik tentang pembangunan Asia Timur. Selain itu, ia juga memberikan pengalaman pribadinya berurusan dengan pemerintah di Korea Selatan, pengamatannya di Hong Kong dan China. Dia membagi struktur buku menjadi 6 bab dan telah membuat subbab yang membantu pembaca fokus pada topik tertentu. Namun, buku ini hampir tidak membahas tentang mencapai pertumbuhan. Kekayaan buku ini tentunya berasal dari kompleksitas pembangunan masing-masing negara, gambaran tentang kebijakan dan bagaimana reaksi pemerintah pada periode waktu tertentu. Beberapa bab perlu diperbaiki dengan perbandingan yang komprehensif dan sistematis tentang ketimpangan, kemiskinan dan



Judul: ***East Asian Development: Foundations and Strategies***

Penulis: **Dwight H. Perkins**

Tahun Terbit: **2013**

Penerbit: **Harvard University Press**

Halaman: **203**

peran pertanian. Selain itu, statistik dari masing-masing negara mungkin berguna untuk meningkatkan analisis. Selanjutnya, pembaca mungkin memiliki kesimpulan sendiri tentang tiga pertanyaan yang coba dijawab buku ini karena kesimpulannya tidak dapat ditarik secara eksplisit.

(Rosy Riani)

### Referensi

- Bastagli, F, Coady, D & Gupta, S 2012, *Income inequality and fiscal policy*, International Monetary Fund staff Discussion Note, vol. 8, no.8.
- Beddoes, ZM 2012, 'For richer, for poorer', *The Economist* 13, viewed 14 May 2015, <http://www.economist.com/node/2156441>.
- Gaiha, R, Imai, K & Nandhi, MA 2006, *Millenium development goal of halving poverty in the Asia and the Pasific region: progress, prospect and priorities*, IFAD, viewed 14 May 2015, < <http://www.ifad.org/operations/projects/regions/pi/paper/1.pdf>>.
- Glewwe, P, Maiga E & Zheng H 2007, *The contribution of education to economic growth in sub Saharan Africa: a review of evidence*, Departemen of Applied Econmic, University of Minnesota viewed 22 May 2015, <http://faculty.apec.umn.edu/pglewwe/documents/Afredgrt3.pdf>.

Perkin, D 2013, *East Asian Development: Foundations and Strategies*, Cambridge, MA, Harvard University Press.

Permani, R 2008, 'Education as a Determinant of Economic Growth in East Asia: Historical Trends and Empirical Evidences (1965-2000)', University of Adelaide, viewed 20 May 2015, < <https://apebhconference.files.wordpress.com/2009/09/permani-20081.pdf>>.

Symoniak, JD 2011, 'The Washington consensus', *New Voices in Public Policy*, vol. 5, pp. 1-20.

Wilderman, J 2012, 'Odd tiger out: was hongkong really a laissez fairez miracle?', viewed 23 May 2015, < <http://www.thinkir.co.uk/odd-tiger-out-hong-kong/>>.



# Dari Kota Apel Hingga *The Big Apple*

Bintang Andhika Marta

**“Aku pernah terjatuh dan terpuruk, penuh ketakutan bahkan untuk bermimpi”.**

**S**erangkaian monolog tersebut membawa kita masuk ke dalam cerita kehidupan Iwan Setyawan atau Bayek (Ihsan Tarore) yang penuh perjuangan untuk mengubah nasib hidup keluarganya. Setelah kejadian penjambretan terhadap dirinya di kereta cepat New York, bayangan Bayek di masa kecil kerap hadir membawa kenangan-kenangan dirinya waktu masih duduk di bangku sekolah. Bayek dan ke-4 saudaranya yang besar di Kota Malang memiliki kehidupan yang bisa dibilang sulit. Sejak kecil orang tua Bayek mengajarkan ia dan saudara-saudaranya untuk hidup kuat berani melawan dunia. Hasim (Alex Komang), ayah Bayek, adalah seorang supir angkot di Batu Malang. Bapak yang mendidik Bayek dengan

sangat keras ini ingin membuat anak laki-laknya memiliki karakter tangguh dan pemberani. Bapaknya mempunyai pemikiran jika dunia itu milik orang-orang yang pemberani. Hal ini berbeda dengan Ibunya, Ngatinah (Dewi Irawan), yang adalah seorang ibu yang teduh, selalu menyayangi anak-anaknya, dan selalu berusaha agar anaknya sekolah walaupun dirinya tidak tamat sekolah.

Perjuangan yang dilakukan oleh Bayek untuk mengubah garis kehidupan keluarganya sangat

## 9 Summers 10 Autumns

Waktu Rilis **25 April 2013**

Negara Asal **Indonesia**

Sutradara **Ifa Isfansyah**

Penulis Naskah **Ifa Isfansyah, Fajar Nugros, Iwan Setyawan**

Produser **Arya Pradana, Edwin Nazir**

Pemain **Ihsan Tarore, Alex Komang, Dewi**

**Irawan, Dira Sugandi, Hayria Lontoh, Shafil Hamdi Nawara, Agni Pratistha, Ence Bagus, Epy Kusnandar**

Sinematografi **Gandang Warah**

Editor **Edi Cahyono**

Musik **Elfa Zulham**

Durasi **120 menit**

panjang. Dalam kesehariannya, Bayek sangat giat dalam menuntut ilmu. Dengan kecerdasannya, Bayek akhirnya berhasil meraih bangku kuliah tanpa harus mengikuti ujian masuk. Perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan membuat dirinya semakin kuat dan optimis untuk meraih masa depan. Secara perlahan, kerja keras Bayek membuahkan kesuksesan yang bahkan mampu melebihi impian masa kecilnya untuk dapat memiliki sebuah kamar tidur sendiri di rumahnya.

Film ini diadaptasi langsung dari buku dengan judul yang sama, "*9 Summers 10 Autumns*" karya Iwan Setyawan, yang merupakan kisah nyata dari perjalanan hidupnya. Walaupun tidak serinci jalan cerita dalam buku, film yang disutradarai oleh Ifa Isfansyah ini mampu menampilkan garis besar cerita yang ingin disampaikan oleh Iwan Setyawan. Bayang-bayang Bayek kecil mampu ditampilkan dengan baik oleh sutradaranya. Ifa juga dengan jeli memperhatikan setiap detil yang dibutuhkan agar cerita di dalam film ini dapat ditampilkan secara apik.

Pertama kali menonton film ini, saya langsung jatuh cinta dengan teknik pengambilan gambar oleh tim produksi. Ifa dan tim mampu mencari sudut-sudut pengambilan gambar yang cantik dan estetik sehingga Kota Malang dan New York terlihat menjadi sangat indah. Ifa juga mengemas cerita dengan pintar. Walaupun alur cerita maju mundur, hal ini tidak membuat penonton perlu berpikir keras dalam mencerna jalan cerita film ini.

Permainan emosi yang disajikan dalam film ini juga sangat bagus. Bahkan, menurut saya, konflik-konflik yang muncul sangat *relate* dengan kehidupan nyata di kampung. Seorang bapak yang dengan keras mendidik anaknya agar menjadi apa yang dia harapkan, seorang ibu yang dengan tabah mengikhlasakan anaknya merantau keluar kota hingga luar negeri, dan perjuangan seorang anak mengubah nasib keluarganya. Semua itu tersaji dengan matang di dalam film ini.

Film *9 Summers 10 Autumns* adalah salah satu film yang diadaptasi dari kisah nyata, yang berusaha menyentuh hati para penontonnya lewat kisah sukses yang disajikan. Namun, perbedaan film ini dengan film motivasi lainnya adalah bagaimana sang sutradara menceritakan kisahnya. Tidak hanya berfokus pada karakter utama, Ifa dan tim mampu menceritakan kehidupan para karakter keluarga yang berada di sekitar sang karakter utama sehingga menjadikan film ini lebih menarik. Menurut saya, film ini begitu hangat dan emosional, serta sangat layak untuk jadi salah satu film terbaik Indonesia!



# Tanjung Bongo:

Surga Kecil di Pulau Halmahera

Jika melihat peta Indonesia, kita bisa menemukan sebuah provinsi kecil yang bentuk pulauanya menyerupai huruf 'K', bukan? Itulah Provinsi Maluku Utara. Meski berukuran kecil, wilayah yang dijuluki negeri para raja ini memiliki pesona alam dan pesona bahari yang beragam sehingga tak jarang para pelancong dalam dan luar negeri berkunjung ke provinsi yang kaya akan rempah ini.





Foto  
BPKP  
MALUT

Dilansir dari Kompaspedia, Maluku Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia Timur yang memiliki 805 pulau besar dan kecil yang dikelilingi oleh gunung, bukit, dan lautan. Jika kalian berkunjung ke Bumi Moloku Kie Raha ini jangan sampai melewati baronda (berkeliling) ke tempat wisata seperti wisata alam, kuliner, hingga sejarah dan budaya. Salah satu wisata yang sangat sayang untuk dilewatkan adalah wisata alam Tanjung Bongo.

Tanjung Bongo merupakan sebuah wisata alam hits di Pulau Halmahera dalam tiga tahun terakhir ini. Wisata alam ini digadang-gadang sebagai 'Raja Ampat Mini' karena memiliki gugusan pulau yang banyak ditambah keindahan bahari yang membuat mata tersihir oleh keindahannya. Keindahan bahari yang dapat kita temukan di Tanjung Bongo di antaranya terumbu karang, jernihnya laut biru, serta ikan hias. Tanjung Bongo ini diketahui memiliki luas sekitar 250 hektar dan merupakan danau terbesar yang ada di Pulau Halmahera. Kalian dapat menikmati wisata alam ini di Desa Pune, Kecamatan Galela, Halmahera Utara. Untuk sampai di lokasi ini, cukup mudah dari Kota Ternate menuju ke Kabupaten Halmahera Utara dapat melalui jalur laut atau via jalur udara.

Apabila pengunjung ingin menikmati pemandangan dan kesegaran udara di Maluku Utara, maka disarankan untuk melakukan perjalanan melalui jalur laut dengan menggunakan Kapal Feri menuju Kota Sofifi, kemudian disambung

jalur darat dengan waktu tempuh sekitar 4 jam. Untuk pembaca yang punya kecenderungan 'mabuk laut', terdapat opsi melalui jalur udara menggunakan pesawat terbang dan mendarat di Bandar Udara Kuabang Kao Halmahera atau melalui jalur darat menuju Galela sekitar satu jam.

Sebelum menuju ke lokasi wisata, penulis sarankan untuk mengganjal perut dengan menikmati makanan sederhana tetapi nikmat yang dijual oleh warga sekitar, seperti Mie Instan, Pisang Mulut Bebek dengan Sambel Roa, Nasi Kuning, dan Nasi Ikan. Untuk minumannya, kita bisa menikmati kesegaran air mineral, teh dengan berbagai varian rasa, maupun kopi kemasan.

Setelah perut terisi makanan yang cukup, kita bisa berjalan menuju pelabuhan Soal Sio, Galela, Halmahera Utara untuk menyewa perahu nelayan atau warga Maluku Utara biasa menyebutnya 'Katinting'. Biaya sewa Katinting ini bisa dibilang cukup murah, kalian cukup merogoh kocek Rp20.000,00 per orang untuk sampai ke Tanjung Bongo. Naik Katinting dari Pelabuhan Soa-sio menuju Tanjung Bongo menempuh jarak 300 meter dengan waktu tempuh sekitar 5 menit. Oh ya, biaya ini untuk menyebrang pulang pergi. Cukup murah, bukan?

Sebelum menyebrang, akan lebih baik jika kita membawa sedikit bekal berupa minuman dingin untuk menghilangkan dahaga saat mengelilingi Tanjung Bongo karena di lokasi wisata tidak ada pedagang. Jangan lupa menggunakan tabir surya



Foto  
BPKP  
MALUT

(*sunblock*) dan topi agar kulit tidak terbakar teriknya matahari di sekitar wisata, atau datang saat sore hari.

Ketika Katinting sudah berjalan, siapkan kamera untuk mengabadikan momen terbaik. Saat membelah perairan menuju lokasi wisata kalian akan dibuat takjub oleh warna air laut yang biru dan jernih sehingga kalian bisa melihat ikan-ikan hias dengan mata telanjang. Selain ikan hias, kalian juga bisa melihat berbagai macam hewan laut, seperti Kepiting Kecil, Ikan Pedang, Ikan Ular Laut, dan Bintang Laut.

Tak hanya dimanjakan oleh pemandangan karang dan air biru saja, pengunjung juga bisa merasakan kesegaran udara yang asri karena di sekitar lokasi wisata terdapat berbagai macam pohon, seperti Pohon Bakau, Pohon Jeruk, dan lain-lain.

Bagi yang ingin mengabadikan foto, di lokasi wisata ini menyediakan sepuluh spot foto yang menarik, di antaranya jembatan bambu, rumah kayu, batu dengan latar belakang tulisan Tanjung Bongo, jembatan merah, rumah bambu, keramba,

kolam ikan, tower, pemandangan Gunung Berapi Dukono, dan tulisan kata-kata mutiara. Berkunjung ke Tanjung Bongo, pengunjung bisa ikut berendam di air laut bersama ikan-ikan, batobo (berenang), diving, dan snorkling untuk melihat langsung surga bawah laut. Sayangnya, fasilitas diving dan snorkling baru dapat dinikmati pada akhir pekan.

Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata ini dibangun melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp600.000.000,00 per desa. Program ini dilaksanakan pada tahun 20220 dengan membangun sarana dan prasarana wisata meliputi cottage, jalur penghubung dan dermaga apung yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan kesejahteraan sosial. Program PISEW diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan.

(Aprillia Nurul Arifah)

# Teka Teki Sobwas



## Mendatar

- 1 Kerangka Kerja (Bahasa Inggris)
- 2 Didahulukan/diutamakan
- 3 Tuan rumah dalam penyelenggaraan GPDPR ke-7 tahun 2022
- 4 Produk Dalam Negeri
- 5 Pendanaan (Bahasa Inggris)
- 6 Eskalasi
- 7 Keadaan penyimpangan/tidak seperti biasanya

## Menurun

- 1 Chief Executive Officer
- 2 Upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko
- 3 Bersifat menanggapi
- 4 Salah satu fokus pengawasan di Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh BPKP tahun 2021
- 5 Salah satu fokus pengawasan pada Sektor Reformasi Pembagunan SDM dalam APP 2022

## Ketentuan Cara Menjawab:

1. Tulis jawaban di halaman TTS atau di selembar kertas
2. Foto/scan jawaban
3. Kirim jawaban ke [wartapengawasan@gmail.com](mailto:wartapengawasan@gmail.com) dengan subjek: Jawaban Teka Teki Sobwas 2/2022
4. Cantumkan Nama Lengkap, Nomor Telepon, Alamat Lengkap, dan Instansi>Nama Kampus (jika ASN/Mahasiswa)

**Batas pengiriman jawaban TTS: 30 September 2022**

Pemenang terpilih akan mendapat hadiah menarik dan diumumkan di Majalah Warta Pengawasan Edisi 3/2022.

**Pemenang TTS WP 1/2022:**

1. Reza Ferdiansyah - Jakarta
2. R. Pratomo Aji - Jakarta
3. Firman Putra - Pangkalpinang





**39** TAHUN  
BPKP

*#kianbermakna*

39  
TAHUN  
BPKP

Dharma Wanita Persatuan  
Kantor  
Kecamatan  
Kecamatan  
Kecamatan



02

## **PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) ESENSI, KONSOLIDASI, DAN IMPLEMENTASI**

Oleh: Dwi Kiswanto

11

## **MENGULAS P3DN DARI PERSPEKTIF SPIP TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH**

Oleh: Carlo Rivelacio

17

## **BENANG MERAH KEPUASAN KERJA DAN *FOLLOWERSHIP***

Oleh: Arief Irwanto Lasantu

# PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) ESENSI, KONSOLIDASI, DAN IMPLEMENTASI

**Dwi Kiswanto, PhD.**

Subkoordinator Penelitian dan Pengembangan SPIP  
- Puslitbangwas BPKP

## Pengeluaran Pemerintah dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pengeluaran pemerintah (*government spending*) merupakan salah satu pengungkit utama perekonomian, di mana berbagai bentuk pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif untuk menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara.<sup>1</sup> Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen fiskal penting untuk mengatur kualitas belanja pemerintah agar dapat memberikan dampak yang signifikan dan

berkelanjutan terhadap aktivitas pembangunan dan kemandirian ekonomi.

Pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk belanja barang operasional serta belanja modal menjadi komponen belanja riil dan langsung yang paling efektif untuk menggerakkan ekonomi. Dalam APBN 2022, total belanja barang dan modal pada pemerintah pusat mencapai Rp538,9 Triliun,<sup>2</sup> sedangkan pada level pemerintah daerah (APBD) secara agregat nasional kedua komponen belanja tersebut mencapai Rp526,25

<sup>1</sup> Wu, Shih-Ying, Jenn-Hong Tang, Eric S. Lin. 2010. "The Impact of Government Expenditure on Economic Growth: How Sensitive to the Level of Development", in Policy Modelling 32: 804-817; Kouassi, K. Berenger. 2018. "Public Spending and Economic Growth in Developing Countries: a Synthesis", in Financial Markets, Institutions and Risks 2(2): 22-30.

<sup>2</sup> Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2022, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, tersedia dan dapat diakses pada <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Topics/6>

Trilliun.<sup>3</sup> Komponen belanja tersebut sebagian besar direalisasikan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai mekanisme untuk menyediakan barang/jasa yang tepat secara kuantitas, kualitas, waktu, serta biaya.<sup>4</sup>

Dalam pasar Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah tersebut tersimpan potensi belanja yang dapat diarahkan untuk penggunaan produk dalam negeri, sehingga pemenuhan kebutuhan penyediaan barang/jasa oleh instansi pemerintah tidak harus dipenuhi dari produk impor. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa salah satu *constraint* dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah tingginya nilai impor yang menjadi faktor pengurang pertumbuhan. Sampai dengan akhir Juni 2022, total nilai impor untuk barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal mencapai US\$ 21 Miliar atau meningkat 12,87% dibandingkan dengan bulan Mei 2022 (*m-to-m*) dan meningkat 21,98% dibandingkan dengan Juni 2021 (*y-on-y*).<sup>5</sup>

Besarnya proporsi impor dalam pemenuhan kebutuhan ba-

rang konsumsi, bahan baku, dan barang modal juga tercermin dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan barang/jasa pemerintah belum secara optimal menyerap produk dalam negeri dan/atau didukung dengan ketersediaan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri yang mampu mensubstitusi produk impor. Padahal, orientasi penggunaan produk dalam negeri dalam pemenuhan kebutuhan permintaan barang/jasa pemerintah akan mengamankan pasar domestik; memperkuat struktur industri dalam negeri; serta meningkatkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional.<sup>6</sup> Penggunaan produk dalam negeri juga akan memberikan *multiplier effect* bagi pengurangan impor, penghematan devisa negara, proteksi/stabilitas nilai tukar, penciptaan investasi dan lapangan kerja, serta pertumbuhan industri kecil dan menengah.<sup>7</sup>

### **Aransemen Institusional: Penegakan dan Revitalisasi**

Kampanye dan agenda pemerintah terhadap penggunaan produk dalam negeri telah dimulai

<sup>3</sup> Belanja Pemerintah Daerah dalam APBD 2022, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, tersedia dan dapat diakses pada <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

<sup>4</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

<sup>5</sup> Berita Resmi Statistik No.50/07/Th.XXV 15 Juli 2022, Badan Pusat Statistik (BPS).

<sup>6</sup> Mukeri, Mukeri. 2012. *Kemandirian Ekonomi Solusi untuk Kemajuan Bangsa*. Majalah Ilmiah Universitas Pandanaran Vo.10 (24).

<sup>7</sup> Buku Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2020, Pusat P3DN Kementerian Perindustrian.

setidaknya di tahun 2009 melalui inisiasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.<sup>8</sup> Agenda tersebut juga didukung dengan ditetapkannya Tim Nasional P3DN<sup>9</sup> serta diterbitkannya Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri.<sup>10</sup> *Milestone* berikutnya atas kampanye penggunaan produk dalam negeri adalah di tahun 2014 paralel dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang di antaranya mengandung klausul penegasan yang mengatur pemberdayaan dan penguatan industri dalam negeri, dan salah satu strategi yang relevan adalah penggunaan produk dalam negeri.<sup>11</sup>

Di tahun 2018, pemerintah kembali menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri. Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Produk Dalam Negeri. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 2018, pengguna produk dalam negeri yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwajibkan memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan barang/jasa yang akan digunakan, yang mencantumkan spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam konteks mekanisme pengadaan barang/jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah juga harus memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik.<sup>12</sup>

Awal tahun 2022 menjadi momentum baru revitalisasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri. Korelasi antara potensi belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp400 Triliun, dan BUMN senilai Rp100 Triliun untuk produk dalam negeri (Usaha Kecil dan Menengah)

<sup>8</sup> Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Tim Nasional P3DN.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri.

<sup>11</sup> Pasal 85 UU 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

<sup>12</sup> Pasal 66 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>13</sup> Model atau formulasi perhitungan BPS atas output PDB adalah  $X = (I - A)^{-1}F$  dimana  $X$  mencerminkan Output PDB,  $(I - A)^{-1}$  mencerminkan matriks pengganda/multiplier, sedangkan  $F$  adalah permintaan akhir (substitusi belanja pemerintah dari barang impor ke barang domestik) - Kebijakan Substitusi Belanja Impor Pemerintah ke Produk Domestik, Badan Pusat Statistik (BPS), 21 Februari 2022.



dan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7% menjadi salah satu klaim penting yang dinyatakan pemerintah.<sup>13</sup> Presiden menetapkan Instruksi Presiden No.2 Tahun 2022 yang menekankan kembali pentingnya penggunaan produk dalam negeri melalui instruksi umum penggunaan produk dalam negeri serta instruksi khusus kepada sejumlah Kementerian/Lembaga dalam mengawal implementasinya.<sup>14</sup> Pesan praktikal yang sama juga disampaikan oleh Presiden dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional - Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, di mana Presiden secara eksplisit menyatakan bahwa belanja modal serta belanja barang/jasa harus diarahkan kepada pembelian produk dalam negeri dan di saat

yang sama menyiapkan kapasitas produksi nasional untuk mengurangi/substitusi produk impor.<sup>15</sup>

### Manifestasi dan Konsep P3DN

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia memiliki target capaian dan akuntabilitas yang besar. Meskipun indikator kinerja terkait P3DN sudah dinyatakan secara jelas dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024, dengan adanya revitalisasi P3DN melalui Aksi Afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia menyiratkan bahwa keberhasilan P3DN di rezim yang baru tidak hanya diukur dari, tapi harus melampaui pemenuhan target/indikator kinerja yang telah ditetapkan.

**Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024**  
 Sasaran Strategis 3 - Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri

| No | IKU/IK                                                                                         | Baseline (LAKIP Kementerian Perindustrian 2019) | Satuan | Target |       |       |       |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                |                                                 |        | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)                                       | n/a                                             | Persen | 49,0   | 49,9  | 50,9  | 52,0  | 53    |
| 2  | Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah | n/a                                             | Persen | 46,63  | 48,02 | 49,47 | 50,95 | 52,48 |
| 3  | Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku                                            | 5.065                                           | Produk | 6.200  | 6.630 | 7.130 | 7.640 | 8.400 |
| 4  | Persentase SNI bidang industri yang diterapkan                                                 | n/a                                             | Persen | 5      | 7     | 10    | 15    | 20    |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024

<sup>14</sup> Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>15</sup> Transkrip Sambutan Presiden pada Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) - Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, 28 April 2022, tersedia dan dapat diakses pada <https://www.presidentri.go.id/transkrip/peresmian-pembukaan-musyawah-perencanaan-pembangunan-musrenbang-nasional-rencana-kerja-pemerintah-rkp-tahun-2022/>

Setidaknya ada tiga terminologi kunci (*key terms*) dalam substansi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu: peningkatan, produk dalam negeri, dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

**Yang pertama** adalah penggunaan terminologi ‘peningkatan’ sebagai atribut yang menggambarkan *target* penggunaan produk dalam negeri. Secara etimologi, *peningkatan* (n) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, produksi, dan sebagainya) atau juga dapat diartikan sebagai kenaikan dari kualitas, nilai, status, dan derajat.<sup>16</sup> Sehingga, dalam konteks penggunaan produk dalam negeri, istilah ‘peningkatan’ dapat dipersepsikan sebagai ekspektasi kenaikan atas jumlah penggunaan produk negeri pada pasar pengadaan barang/jasa pemerintah yang secara bersamaan diiringi dengan adanya kenaikan kapasitas produksi, perbaikan kualitas produk, serta kenaikan status proporsi kemandirian penggunaan produk dalam negeri. Dengan demikian, ‘peningkatan’ sebagai suatu ukuran (*measure*) yang menggambarkan selisih

atau *gap* jumlah, kualitas, status, dan derajat antar satuan waktu, harus dapat diukur dengan andal baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.

**Yang kedua**, jika peningkatan dianggap sebagai proses, maka salah satu objek yang diharapkan untuk meningkat adalah produk dalam negeri. Produk dalam negeri didefinisikan sebagai barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.<sup>17,18</sup> Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mengategorikan suatu barang/jasa sebagai produk dalam negeri tidak harus memenuhi unsur tenaga kerja, bahan baku, serta komponen yang seluruhnya harus berasal dari dalam negeri. Substansi yang lebih ditonjolkan dari definisi produk dalam negeri adalah tempat produksi/pengerjaan oleh perusahaan yang berproduksi/berinvestasi yang harus berada di wilayah Indonesia.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018

<sup>17</sup> tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

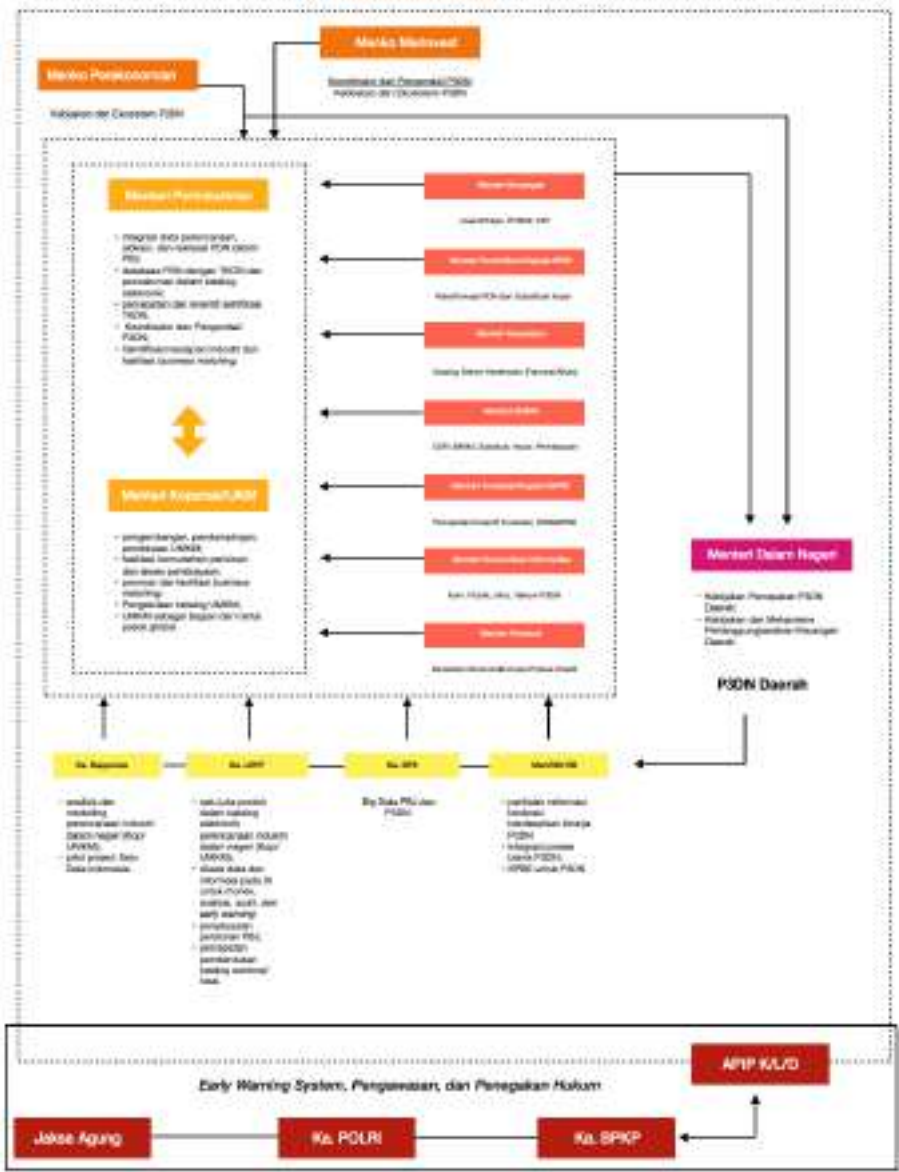
<sup>18</sup> UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mendefinisikan bahan baku sebagai bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi.

**Yang ketiga,** standarisasi dan pengaturan penggunaan bahan baku serta komponen dalam negeri diatur dalam bentuk penilaian dan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011, TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa. Nilai TKDN dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya komponen dalam negeri dengan jumlah biaya komponen dalam negeri dan biaya komponen luar negeri, yang di antaranya mempertimbangkan bahan baku material, tenaga kerja, alat kerja/fasilitas, serta biaya penelitian/pengembangan. Kriteria dan teknis pengukuran TKDN untuk suatu produk dalam negeri secara rinci dan teknis dalam peraturan khusus untuk setiap *cluster* atau sektor produksi, antara lain seperti yang tercantum dalam tabel di atas.

### **Pola Koordinasi dan Pemangku Kepentingan (*cross-cutting*)**

Pelaksanaan Aksi Afirmasi P3DN, terutama setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, membawa perubahan mandat yang signifikan dan tegas pada instansi dan aktor pemerintahan terkait. Setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah memiliki tanggung jawab serta diharapkan proaktif mendukung dan tertibat dalam implementasi P3DN, sesuai yang tertuang dalam poin-poin instruksi khusus dalam Instruksi Presiden tersebut. *Directives* yang diamanatkan oleh Presiden secara spesifik menyasar dan melekat pada peran dan fungsi dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun juga terdapat peran dan fungsi yang bersifat *intersectional* dan lintas sektoral. Arahan Presiden telah berdampak pada penyesuaian pola hubungan/koordinasi institusional implementasi P3DN termasuk pembaruan Tim Nasional P3DN.

Peta Hubungan Koordinasi Lintas Instansi P3DN



Sumber: Diolah sesuai Instruksi Presiden No.2 Tahun 2022

Kementerian/lembaga/pemerintah daerah juga diharapkan untuk segera melakukan penyesuaian dokumen perencanaan strategis dan mengakomodasi

target penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN > 25% dan nilai penjumlahan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% da-



lam rencana pengadaan barang/jasa. Arahkan optimalisasi belanja minimal 40% untuk produk Koperasi/UMKM atau artisan lokal juga sangat jelas diatur dalam beberapa regulasi. Kepatuhan dan capaian target belanja dan penggunaan produk dalam negeri tersebut akan menjadi salah

satu indikator kinerja instansi pemerintah untuk menentukan kualitas reformasi birokrasi, penyelenggaraan pemerintahan. Bagi pemerintah daerah, capaian akan berpengaruh pada kriteria, formulasi, serta penyaluran dana insentif pemerintah pusat ke daerah.

#### Kebijakan P3DN Berdasarkan Segmentasi Sektoral

| No | Regulasi                                                         | Referensi                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Peraturan Menteri Perindustrian</b><br>No.54/M-IND/PER/3/2012 | Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan                                                                                                                                  |
| 2  | <b>Peraturan Menteri ESDM</b><br>No.15 Tahun 2013                | Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi                                                                                                                                               |
| 3  | <b>Peraturan Menteri Kominfo</b><br>No.27 Tahun 2015             | Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran                                                                                                |
| 4  | <b>Peraturan Menteri Perindustrian</b><br>No.05 Tahun 2017       | perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No.54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan                                                         |
| 5  | <b>Peraturan Menteri Perindustrian</b><br>No.31 Tahun 2017       | Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian No.19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal Ijin |
| 6  | <b>Peraturan Menteri Kominfo</b><br>No.04 Tahun 2019             | Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi <i>Long term Evolution</i>                                                                                                           |
| 7  | <b>Peraturan Menteri BUMN</b><br>No.PER08/MBU/12/2019            | Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN                                                                                                                                                                   |

Sumber: Kompilasi

#### Pemetaan Risiko dan Pengawasan P3DN

Implementasi atas P3DN diatas membutuhkan peran pengawasan dan pengawasan, terutama dengan memperhitungkan adanya beberapa risiko yang diasosiasikan dengan hambatan yang dapat mempengaruhi sasaran dan akuntabilitas P3DN secara

keseluruhan. Identifikasi risiko dalam kaitannya dengan implementasi P3DN menjadi langkah krusial dalam perspektif pengawasan untuk melihat kualitas tata kelola, kecukupan pengendalian, serta rencana mitigasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah/pemangku kepentingan terkait.

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Representasi dari tiga aspek P3DN, yaitu *demand*, *supply*, dan *market* telah terinstitusionalisasi dalam formulasi dan *enforcement* kebijakan P3DN, penyelenggaraan *business matching* dan rekonsiliasi dengan kepatuhan rencana belanja produk dalam negeri, serta penguatan *platform* sistem informasi P3DN dan pasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Beberapa titik kritis dan potensi penyalahgunaan wewenang (*fraud*) adalah a) risiko benturan kepentingan (*conflict of interests*) terutama bagi aktor/pihak yang terafiliasi dengan elit politik; b) risiko validitas (diskrepansi) data rencana umum pengadaan dan komitmen *business matching* yang tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan; c) risiko keamanan data (*data security*) atas integrasi *tools* atau aplikasi SiRUP, *e-katalog*, *e-purchasing*, *e-tendering*, *e-kontrak*, dan sistem informasi pengelolaan keuangan; d) risiko manipulasi dokumen administrasi produk dalam negeri, termasuk pemalsuan perizinan dan sertifikasi yang dilakukan oleh calon penyedia barang dan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan TKDN; e) risiko kolusi, nepotisme, dan favoritisme dalam mengikutsertakan dan mengotorisasi calon penyedia barang atau pelaku usaha ke dalam katalog elektronik; f) risiko pembatasan akses dan kompetisi yang tidak sehat da-

lam proses Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); serta g) risiko negosiasi/penentuan harga penawaran dan pemberian *margin* atau *kickback*.

Untuk memastikan akuntabilitas keuangan dan kinerja dari implementasi P3DN, tujuan pengawasan harus diinterpretasikan lebih luas dari cakupan pengawasan atas pemenuhan dan kepatuhan pelaksanaan P3DN termasuk konsistensi komitmen pengguna produk dalam negeri.<sup>20</sup> Pengawasan harus konvergen, integratif, dan komprehensif untuk menysar kebijakan, implementasi, dan kepatuhan dari masing-masing aspek *demand*, *supply*, dan *marketplace* P3DN.

Desain pengawasan P3DN yang dikembangkan harus mampu memotret berbagai spektrum kebijakan, implementasi, dan kepatuhan P3DN melalui aktivitas *assurance* dan *consulting* yang proporsional. Spektrum tersebut mewakili perspektif pemerintah pusat dalam konteks implementasi dan konsolidasi nasional, perspektif pemerintah daerah, perspektif korporasi BUMN, dan perspektif segmen industri (sektoral). Prinsip konvergen dan integratif juga diartikan sebagai pengawasan kolaboratif melalui kerjasama dan fungsi koordinasi pengawasan intern dengan APIP pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

<sup>20</sup> Pasal 76 Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

# MENGULAS P3DN DARI PERSPEKTIF SPIP TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH

**Carlo Rivelacio,**  
Auditor pada Deputy Bidang  
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP

Pengesahan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menjadi *starting point* baru bagi BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan substansi peraturan tersebut, BPKP telah melakukan transformasi framework dalam pembinaan SPIP selanjutnya. Transformasi ini secara khusus diarahkan pada upaya perolehan keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP

pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah telah mendukung pencapaian tujuan sesuai dengan mandat yang ditetapkan.

Sebagai salah satu bentuk upaya pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2022, Presiden telah memberikan mandat bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini kemudian menjadi sebuah kerangka pembahasan yang menarik. Bagaimana SPIP Terintegrasi dapat mendukung pencapaian tujuan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan?

**Fase Pengembangan Berkelanjutan dari Upaya Pembinaan**

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP memiliki peran strategis sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. Pembinaan dilakukan mulai dari penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pembimbingan dan

konsultansi, hingga pada peningkatan kompetensi APIP.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut, menurut pemetaan strategi implementasi penyelenggaraan SPIP oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, terdapat lima fase pengembangan SPIP. Kelima fase pengembangan ini diselaraskan sesuai dengan periode RPJMP.



Sumber: Strategi dalam Implementasi Pembaruan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2021)

Dalam lingkup RPJMN 2020-2024, pembinaan penyelenggaraan SPIP diformulasikan sebagai pemenuhan kebutuhan. Untuk mewujudkan transformasi tersebut, perlu dilakukan upaya mendorong pelaksanaan SPIP dan penilaian risiko atas sektor/urusan yang berisiko tinggi terhadap pencapaian tujuan kementerian/lembaga/pemerintah Daerah atau tujuan program strategis negara.

Berbeda dari konsep sebelumnya, transformasi pembinaan penyelenggaraan SPIP dengan konsep yang baru, harus dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan. Hal ini jelas bukan hanya sekadar memberikan ukuran/nilai. Dalam konsep ini, penyelenggaraan SPIP yang dinilai berdasarkan keberadaan struktur dan proses pengenda-



lian tidak dihilangkan, melainkan dilengkapi dengan komponen evaluasi perencanaan dan pencapaian tujuan SPIP, yakni memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas

dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



Sumber: Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

### Pengembangan Rencana Tindakan dalam Penetapan Tujuan

Dalam konteks P3DN tahun 2022, Presiden telah memberikan sejumlah mandat bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Mandat tersebut dimaktubkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia.

Secara umum, instruksi ditujukan untuk melakukan percepa-

tan P3DN, namun dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri memiliki mandat khusus yang menjadi poin penting dalam penetapan tujuan P3DN. Penetapan tujuan berkaitan dengan kualitas perencanaan kinerja. Lebih lanjut, perencanaan kinerja yang berkualitas harus mempertimbangkan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, dan memperlihatkan hubungan *cascading* pada level entitas dan unit kerja.

Sebagai pemenuhan komponen penetapan tujuan pada

SPIP Terintegrasi tematik P3DN, Kementerian Dalam Negeri perlu memperbarui kebijakan dengan mengakomodasi penetapan sasaran strategis P3DN. Sasaran tersebut harus dilengkapi dengan perumusan indikator yang spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), terkait langsung dengan apa yang akan diukur (*relevant*), dan mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu (*time-bound*). Indikator yang dirumuskan misalnya, persentase realisasi *business matching*, jumlah produk dalam e-katalog, serta efektivitas implementasi kebijakan dan tim P3DN. Dengan demikian, instruksi untuk memasukkan indikator P3DN dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan rencana tindakan yang harus ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab.

### **Manajemen Risiko dalam Struktur dan Proses Pengendalian**

Kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP didapat dari pemenuhan parameter sub unsur SPIP. Pemenuhan parameter tersebut juga termasuk pada parameter Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Risiko wajib diidentifikasi dan dianalisis serta dievaluasi sebelum menjadi permasalahan yang dapat menghambat tujuan P3DN.

Orientasi pengawasan BPKP atas P3DN telah didesain untuk menghasilkan gambaran evaluasi atas titik kritis risiko yang akan menghambat pencapaian tujuan. Melalui kegiatan *reviu*, BPKP telah merumuskan *Tentative Review Objectives* (TRO), termasuk titik kritis kecurangan yang dapat dijadikan sebagai risiko inheren P3DN. TRO P3DN diidentifikasi dalam tahapan *reviu* kebijakan dan *reviu* kepatuhan implementasi kebijakan, yang terbagi dalam aspek institusionalisasi, *demand*, *supply*, dan *market*, serta pengendalian dan pengawasan yang menunjukkan peranan APIP dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi P3DN. Hal ini dapat membantu perumusan struktur dan proses pengendalian yang diperlukan dalam penanganan risiko tersebut secara tepat.

TRO dalam konteks P3DN yang berhasil diidentifikasi antara lain:<sup>1</sup>

1. Tim P3DN tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Pemerintah daerah belum memiliki kebijakan terkait keberpihakan/perlindungan/penggunaan produk lokal dalam mendorong produktivitas dan daya saing UMKM;
3. Pemerintah daerah belum memiliki kebijakan preferen-

<sup>1</sup> Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis *Reviu* Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pemerintah Daerah

- si harga untuk produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%;
4. Pemerintah daerah belum memiliki kebijakan terkait kemudahan penyedia barang/jasa untuk masuk dalam katalog lokal;
  5. Pemerintah daerah belum merencanakan untuk mengalokasikan proporsi pengadaan barang/jasa minimal 40% untuk penggunaan produk UMK dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
  6. Dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa tidak mencantumkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri;
  7. Dokumen proses pengadaan barang dan jasa tidak mencantumkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri;
  8. Dokumen kontrak/dokumen yang dipersamakan dengan kontrak tidak mencantumkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri;
  9. Terdapat produk dalam negeri yang memiliki TKDN 25% dan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen), namun tidak dibeli oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah membeli produk lain;
  10. Realisasi barang yang direncanakan PDN dalam RUP pada saat pengadaan bukan merupakan produk dalam negeri;
  11. Produk dalam negeri yang dibutuhkan tidak tersedia;
  12. Pendaftaran produk/jasa dan penyedia ke dalam e-katalog lokal belum ditetapkan prosedurnya atau memiliki prosedur yang tidak jelas, rumit, memakan waktu, dan dipungut biaya;
  13. Tidak terdapat perkembangan yang berarti jumlah produk yang tayang dalam e-katalog lokal;
  14. Realisasi pengadaan melalui e-katalog rendah;
  15. Produk yang tercatat sebagai PDN dalam e-katalog sebenarnya bukan PDN;
  16. PPK tidak melakukan revidu kinerja penyedia dan belum mengevaluasi kinerja penyedia;
  17. OPD Teknis belum melakukan monitoring dan revidu terhadap implementasi P3DN;
  18. Pelaku UMKM dan koperasi belum mendapatkan pembinaan pemerintah daerah;
  19. Pemda melalui Dinas Perindustrian/Perdagangan/Koperasi dan UKM belum melakukan fasilitasi sertifikasi TKDN; dan
  20. APIP Daerah belum melakukan pengawasan terhadap implementasi P3DN.

### **Evaluasi Keberhasilan dengan Penilaian Pencapaian Tujuan**

Evaluasi pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada P3DN secara implisit ditujukan untuk menilai efektivitas pengendalian secara keseluruhan dengan membandingkan pencapaian atas target indikator P3DN. Oleh sebab itu, IKK harus diperoleh secara lengkap berdasarkan pe-

netapan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pencapaian tujuan atas keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset diwujudkan dengan melakukan reviu atas realisasi belanja P3DN, baik dalam

belanja barang dan jasa, maupun belanja modal.

Secara konseptual, kerangka implementasi SPIP Terintegrasi atas P3DN pada pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Diolah dari Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, Modul SPIP Tematik PBJ, dan Pedoman Reviu P3DN.

## Simpulan

Melalui *framework* SPIP Terintegrasi, pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh BPKP lebih diformulasikan sesuai dengan kebutuhan pencapaian tujuan. Transformasi pembinaan penyelenggaraan SPIP pada P3DN di Pemerintah Daerah harus dapat membuktikan efektivitas pengendalian dalam membantu pencapai-

an tujuan P3DN, bukan hanya sekadar *tools* penilaian. Pencapaian tujuan tersebut ditetapkan dengan indikator P3DN dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.



# BENANG MERAH KEPUASAN KERJA DAN FOLLOWERSHIP

**Arief Irawanto Lasantu,**

Auditor pada Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan  
Keuangan Daerah (PPKD) BPKP

Artikel

*“Ketua timku kok gitu sih, ngasih tugas se-abreg tanpa mikir beban kerja yang aku punya”;*

*“Kepala Bidang ‘menganakemaskan’ beberapa orang di kantor, jadi gak ada job deh”;*

*“Kabag TU ini rapat-rapat terus ke luar kota, pencairan dana perjalanan dinasku jadi banyak yang tertunda”.*

Ketiganya merupakan contoh keluhan-keluhan yang sering dilontarkan terhadap pimpinan di kantor atau mungkin terhadap sebuah organisasi. Jika kita telisik lebih mendalam, ketidakpuasan terkadang muncul bukan akibat pimpinan yang kurang bijaksana, melainkan ekspektasi tinggi dari karyawan. Keluhan-keluhan pada umumnya diikuti pengandaian apabila sang karyawan/anggota organisasi be-

rada di posisi sebagai pemimpin, ia akan mengambil langkah lain dan berusaha lebih baik untuk memenuhi harapan setiap pihak. Padahal dalam suatu organisasi, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin. Sebagian besar unsur perorganisasian dalam organisasi adalah anggota ataupun karyawan yang berkewajiban untuk mengikuti arahan dari pemimpin yang memiliki otoritas. Oleh karena itu, selain kepemimpinan (*leader-*

ship), sebagai karyawan kita juga perlu mengenal *followership*.

Konsep *followership* pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kelley dalam bukunya yang berjudul “*In Praise of Follower*”. Buku tersebut diterbitkan oleh Harvard School Of Business pada tahun 1988 (Baker, 2007). *Followership* merupakan bagian kecil yang tak terpisahkan dalam pembahasan kepemimpinan. Konsep ini membahas bagaimana menerima arahan dengan baik, menjalankan suatu program yang telah disusun, menjadi bagian dari suatu tim dan menyampaikan hasil terbaik atas hal yang telah dilakukan (McCallum, 2013). Disertasi yang dilakukan oleh Farvara Jr (2009) menunjukkan bahwa *follower* yang efektif akan memiliki kepuasan yang meningkat dan berdampak pada perbaikan kinerja.

Untuk lebih mengenal konsep *followership*, kita mesti mengetahui jenis-jenis dari *follower* yang ada dalam sebuah organisasi. Kelley (1988) membagi jenis *follower* menjadi lima, yaitu:

a. *Domba*

Individu-individu ini sangat pasif dan memerlukan eksternal motivasi dari pemimpin. Individu ini kurang memiliki komitmen dan memerlukan pengawasan konstan dari pemimpin.

b. *Yes-man*

Individu ini berkomitmen kepada pemimpin dan tujuan (atau tugas) organisasi (atau kelompok tim). Individu ini tidak mempertanyakan keputu-

san atau tindakan pemimpin. Selanjutnya, tipe *Yes-man* akan membela pemimpin mereka ketika dihadapkan dengan oposisi dari orang lain.

c. *Pragmatis*

Orang-orang ini tidak pernah proaktif; mereka tidak akan berdiri di belakang ide-ide kontroversial atau unik sampai sebagian besar kelompok telah menyatakan dukungannya. Individu ini sering berada di belakang kelompok.

d. *Pengasing/Alienated*

Individu yang sering berusaha untuk menurunkan semangat tim dengan cara mempertanyakan keputusan dan tindakan pemimpin. Individu ini sering merasa dirinya adalah pemimpin yang sah dan berhak mengkritik pemimpin yang sebenarnya maupun anggota tim yang lain.

e. *Star follower*

Individu ini teladan yang pemikir positif, aktif, dan independen. Individu ini tidak akan secara membabi buta menerima keputusan atau tindakan seorang pemimpin sampai mereka telah evaluasi sepenuhnya. Selain itu, pengikut jenis ini bisa berhasil tanpa kehadiran seorang pemimpin.

Dalam bukunya, Kelley (2012) menyebutkan untuk menjadi pengikut yang aktif, maka individu harus memiliki karakter berikut:

a. *Manajemen diri*: Ini mengacu pada kemampuan untuk ber-

pikir kritis untuk mengendalikannya tindakan seseorang, dan bekerja secara mandiri.

- b. **Komitmen:** Ini merujuk kepada individu yang mengikatkan diri untuk tujuan, visi, atau tujuan grup, tim, atau organisasi. Ini adalah kualitas penting, pengikut seperti itu membantu menjaga keutuhan (dan anggota lainnya) moral dan tingkat energi yang tinggi.
- c. **Kompeten:** Penting bahwa individu memiliki keterampilan dan bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan atau tugas atau kelompok, tim, atau organisasi. Individu-individu yang tinggi pada kualitas ini sering memiliki keterampilan yang lebih tinggi daripada rata-rata rekan kerja mereka (atau anggota tim). Selanjutnya, individu-individu ini terus mengejar pengetahuan mereka dengan meningkatkan keterampilan mereka melalui kelas dan seminar.
- d. **Keberanian:** Pengikut yang efektif menjaga keyakinan mereka, mempertahankan, dan menegakkan standar etika, bahkan dalam menghadapi ketidakjujuran atau perilaku korup atasan (pemimpin). Individu-individu setia, jujur, dan penting, terang dengan atasan mereka.
- e. Oleh karena itu, dalam berorganisasi, unsur *leadership* dan *followership* haruslah diperhatikan oleh tiap-tiap individu sehingga kegiatan pencapaian tujuan organisasi akan semakin efektif dengan tetap menjaga kepuasan kerja dari masing-masing pihak.

#### Daftar Referensi

Baker, S. D. (2007). *Followership: The theoretical foundation of a contemporary construct*. Journal of Leadership & Organizational Studies, 14(10), 50–60.

Farvara Jr, L. (2009). *Examining Followership Style and Their Relationship with Job Satisfaction and Performance*. Northcentral University, Arizona.

Kelley, R. (1988). *In Praise of Follower*.

Cambridge: Harvard School of Business.

McCallum, J. S. (2013). *Followership; the other side of Leadership*. Ivey Business Journal. Retrieved from <http://iveybusinessjournal.com/topics/leadership/followership-the-other-side-of-leadership#.U55rUvmSxHU>

Whitlock, J. (2012). *The value of active followership*. Nursing Management Journal, 20(2), 17–28.



BPKPgoid



BPKPgoid



BPKP\_id

[www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)